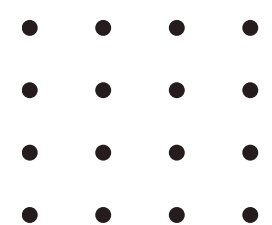


LAPORAN BERJENJANG TRIWULAN IV TAHUN 2025



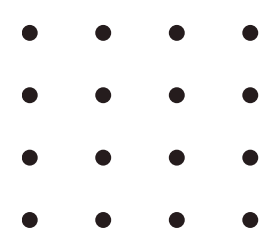
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN



LAPORAN EVALUASI TRIWULAN IV SEKRETARIAT TAHUN 2025



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun laporan setiap pertriwulan yang akan menjadi media pertanggungjawaban organisasi. Laporan ini merupakan bahan evaluasi terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam setiap pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Laporan kinerja triwulan IV Sekretariat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu Timur adalah perwujudan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada DPKPP Kabupaten Luwu Timur atas penggunaan anggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja triwulan IV DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai penjabaran visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

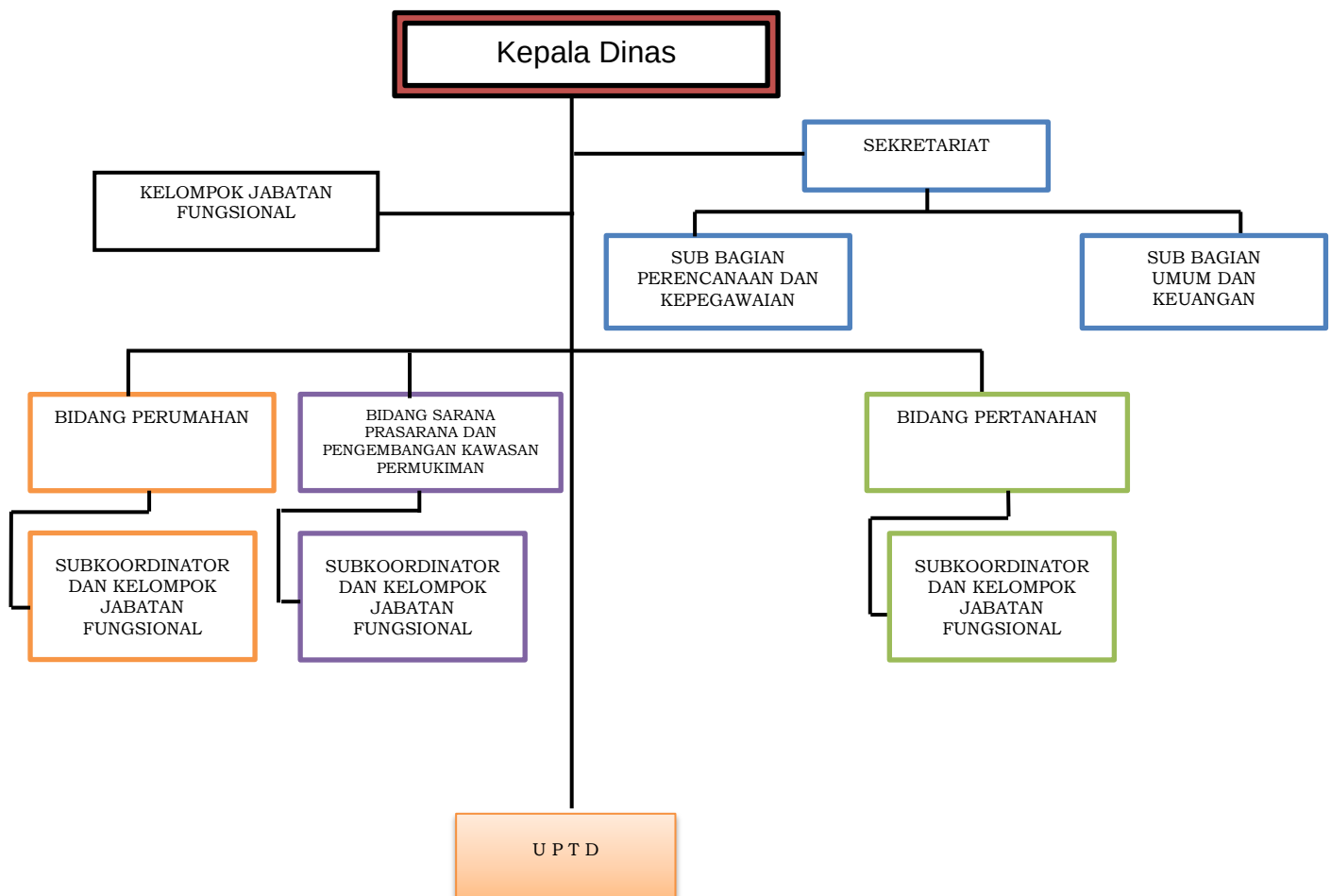
Tujuan Penyusunan laporan kinerja triwulan IV DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi DPKPP Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerjanya.

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, seperti termuat pada bagan di bawah ini sebagai berikut

STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok DPKPP Kabuapten Luwu Timur Sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur. Tugas Sekretaris memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pokok dari Sekretaris DPKPP Kabuapten Luwu Timur, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di DPKPP Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di DPKPP Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2025 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

Tabel 1

**Komposisi SDM Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025**

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Sekretariat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	8	5	13

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia pada akhir tahun 2025 sebanyak 13 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 8 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 5 orang.

Tabel 2

Komposisi SDM

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No	Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	2	3	4	5	6	7		9
1.	Sekretariat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur	-	7	-	-	1	5	13

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah Pegawai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada triwulan IV tahun 2025, berdasarkan jenjang pendidikan, S1 sebanyak 7 orang, D1 1 orang, SMA sebanyak 5 orang.

TABEL 3
Komposisi SDM
Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2025

No	Jenjang Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	III a	1	-	1
2	IV a	-	2	2
Total		1	2	3

Dari tabel 1.3 komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenjang eselon sebanyak 7 orang, terdiri dari eselon III/a sebanyak 1 orang dan eselon IV/a sebanyak 2 orang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Sesuai dengan Visi Luwu Timur yaitu **"LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA"**.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka di perlukan misi. Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 – 2029 melaksanakan misi ke-4 (M4) yaitu :

1. Mewujudkan tata kelola Pemerinatahan yang melayani efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital (M5).

3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau dan layanan pertanahan berkelanjutan

4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

Tabel 4

Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur

SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai AKIP Perangkat Daerah	71,85

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan IKU, tetapi untuk sasaran pada sekretariat tidak termasuk didalamnya, walaupun ditetapkan sebagai sasaran sebagai berikut :

6. Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing sasaran 3 Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 6
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
DPKPP Kabupaten Luwu Timur

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
SASARAN 3: Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Sekretaris dengan Kepala Perangkat Daerah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Pada Triwulan IV Tahun 2025. Sasaran, indikator, target kinerja Program disajikan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Atas Perjanjian Kinerja (terlampir).

:

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target triwulan IV. Dalam bab ini juga akan disajikan realisasi keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan IV Tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja triwulan IV Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Sekretaris dengan Kepala Dinas.

Adapun capaian kinerja Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahn	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	71,85	0	0

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Sasaran Strategis II

Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

Tabel 17

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	71,85	0	0

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran II memiliki indikator nilai Akip DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang realisasinya ini diperoleh dari hasil penilaian Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang dilaksanakan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur. LAKIP merupakan gambaran kinerja yang dicapai oleh perangkat daerah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBD. Sehingga untuk capaian pada sasaran ini belum diperoleh pada triwulan IV.

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung sasaran ini adalah sebagai berikut :

📌 Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan yang mendukung:

- i. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, subkegiatan yang mendukung:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ii. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, subkegiatan yang mendukung:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- iii. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- iv. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - a. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
- v. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- vi. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - g. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- vii. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- viii. Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ix. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- ❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

 - a. Keterlambatan proses administrasi pengadaan barang dan jasa (e-

catalog);

- b. Keterlambatan proses administrasi keuangan;
- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi maka langkah-langkah yang ditempuh adalah :

- a. Melakukan koordinasi pejabat pengadaan dan PPK terkait percepatan proses pengadaan barang dan jasa (e-catalog);
- b. Mencermati rekening belanja dalam proses realisasi keuangan;
- c. Percepatan administrasi pertanggungjawaban keuangan;
- d. Melakukan persecuratan ke BKPSDM terkait kebutuhan pegawai.

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran pendukung, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu:

- a. Efisiensi anggaran pada belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan memaksimalkan peralatan yang ada;
- b. Efisiensi belanja internet kantor yaitu biaya wifi kantor, difasilitasi oleh Dinas Kominfo-SP

❖ Efisiensi Sumber Daya

- a. Terdapat jabatan pelaksana yang masih kosong pada lingkup sekretariat dan untuk mengakomodir semua pelaksanaan tugas, dilakukan rangkap jabatan sebagai pelaksana harian dan memaksimalkan upah jasa dalam membantu pelaksanaan tugas ASN;
- b. Memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan pemeliharaan peralatan secara berkala untuk mendukung pelaksanaan tugas ASN

2. Perbandingan antara Target dan Realisasi dengan Sebelumnya

Adapun target dan realisasi dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 18
Target dan Realisasi Triwulan III

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja		Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		K	Rp									(Realisasi/Target)x 100%			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	6.266.892.544	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Target Kinerja Perangkat Daerah (%)	100	126.317.000	25	25	25	25	25	25	25	0	100	100	100	0
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)	5	60.948.000	1	2	1	1	1	2	1	0	100	100	100	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	*Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	2	5.000.000	-	1	-	1	-	1	-	0	-	100	-	0
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	2	5.000.000	1	-	-	1	1	-	-	0	100	-	-	0

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja		Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		K	Rp	(Realisasi/Target)x 100%											
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	13	55.369.000	3	3	3	4	3	3	3	0	100	100	100	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran (%)	100	4.495.294.144	7	24	29	17	7	24	29	0	100	100	100	0
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	*Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	51	4.429.798.404	21	21	38	51	21	21	38	0	100	100	100	0
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	*Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	18	65.495.740	4	4	4	6	4	4	4	0	100	100	100	0
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Aset Teradministrasi (%)	100	20.824.000	25	25	25	25	25	25	25	0	100	100	100	0
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	4	20.824.000	1	1	1	1	1	1	1	0	100	100	100	0

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja		Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		K	Rp	(Realisasi/Target)x 100%											
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	100	7.155.000	25	25	25	25	25	25	25	0	100	100	100	0
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	*Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Dokumen)	4	7.155.000	1	1	1	1	1	1	1	0	100	100	100	0
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Kepegawaian Sesuai Standar (%)	100	117.864.800	25	25	25	25	25	25	25	0	100	100	100	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	*Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	12	33.668.800	3	3	3	3	3	3	3	0	100	100	100	0
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	23	84.196.000	5	5	5	8	5	5	5	0	100	100	100	0
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Tepat Waktu (%)	100	589.146.400	25	25	25	25	25	25	25	0	100	100	100	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	5.835.000	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	100	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja		Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		K	Rp	(Realisasi/Target)x 100%											
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	*Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	311.088.100	-	-	3	2	-	-	3	0	-	-	100	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	*Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3	16.322.900	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	100	-
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	*Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3	11.320.000	-	1	1	1	-	1	1	0	-	100	100	0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	*Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	72	16.320.000	18	18	18	18	18	18	18	0	100	100	100	0
Fasilitasi Kunjungan Tamu	*Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	15.736.000	3	3	3	3	3	3	3	0	100	100	100	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	*Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	212.524.400	3	3	3	3	3	3	3	0	100	100	100	0
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kesesuaian Pengadaan Barang dengan Rencana Kebutuhan (%)	100	129.200.000	25	25	25	25	25	25	25	0	100	100	100	0
Pengadaan Mebel	*Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	29	70.200.000	-	-	29	-	-	-	29	-	-	-	100	-

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja		Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		K	Rp	(Realisasi/Target)x 100%											
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	59.000.000	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	100	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa sesuai Kebutuhan (%)	100	272.691.200	25	25	25	25	25	25	25	0	100	100	100	0
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	10.261.400	3	3	3	3	3	3	3	0	100	100	100	0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	141.949.800	3	3	3	3	3	3	3	0	100	100	100	0
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	120.480.000	3	3	3	3	3	3	3	0	100	100	100	0
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Dipelihara secara Berkala (%)	100	508.400.000	25	25	25	25	25	25	25	0	100	100	100	0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	13	52.150.000	2	3	4	4	2	3	4	0	100	100	100	0

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja		Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		K	Rp	(Realisasi/Target)x 100%											
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	*Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	67	32.250.000	16	17	17	17	16	17	17	0	100	100	100	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	*Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2	424.000.000	-	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	0

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan ini dengan Target Jangka Menengah.

Pada triwulan IV, yang dapat dibandingkan hanya pencapaian antara kegiatan dan subkegiatan, karena sifatnya dilaksanakan secara rutin.

4. Capaian Program Pendukung Sasaran III

Tabel 19

Capaian Program Pendukung Sasaran III

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja		Target Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Capaian Kinerja Sampai Dengan Triwulan			
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
		K	Rp									(Realisasi/Target)x 100%			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar (%)	100	6.266.892.544	25	25	25	25	25	25	25	25	100	100	100	100

Program Penunjang Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, khususnya pada subbagian perencanaan dan Kepegawaian. Adapun kegiatan dan subkegiatan yang mendukung program ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah

adalah penyiapan dokumen, melalui tiga tahap penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang saling terkait untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja Sekretariat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu timur. Indikator kegiatan adalah jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu jumlah. Tahapan target rencana aksi pada triwulan III, terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan, sehingga capaian 100%. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 4 subkegiatan antara lain :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah proses penyusunan dokumen rencana kerja yang menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan. Dokumen perencanaan ini dibuat untuk jangka waktu tertentu dan menjadi dasar penganggaran,

- pelaksanaan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Terealisasi 100%.
Prosedur SPJ yang Rumit, sehingga realisasi keuangan tidak 100%. Untuk selanjutnya menyesuaikan antara harga yang di E-katalog dalam penyusunan standar harga pada SIPD
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD adalah proses penyusunan rincian anggaran setelah program dan kegiatan diidentifikasi. Untuk subkegiatan ini ditargetkan 100% terealisasi seluruhnya untuk kinerja. Lambatnya proses penyusunan SPJ serta adanya pergantian akun yang memerlukan penyesuaian administrasi dan adanya selisih antara harga yang ditetapkan pada DPA dengan yang tercantum pada E-Katalog, sehingga tidak terealisasi 100% untuk keuangan. Untuk selanjutnya memperhatikan proses penyusunan SPJ setiap triwulan dan Untuk selanjutnya menyesuaikan antara harga yang di E-katalog dalam penyusunan standar harga pada SIPD.
- c. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD adalah tahapan lanjutan dari penyusunan RKA-SKPD yang berfokus pada pengesahan dan pelaksanaan anggaran yang telah disetujui. Terealisasi 100% untuk kinerja. Adanya selisih antara harga yang ditetapkan pada DPA dengan yang tercantum pada E-Katalog, sehingga tidak terealisasi 100% untuk keuangan. Untuk selanjutnya menyesuaikan antara harga yang di E-katalog dalam penyusunan standar harga pada SIPD.
- d. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah proses untuk menilai efektivitas dan efisiensi dari dampak kinerja perangkat daerah. Rencana aksi pada subkegiatan ini, meliputi pengumpulan data, analisis dan penilaian berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk kinerja terealisasi 100%. Adanya selisih antara harga yang ditetapkan pada DPA dengan yang tercantum pada E-Katalog, sehingga tidak terealisasi 100%. Untuk selanjutnya menyesuaikan antara harga yang di E-katalog dalam penyusunan standar harga pada SIPD.
- 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** adalah penataan keuangan, pencatatan, pengeluaran dan pemasukan melalui tiga tahap penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah yang saling terkait untuk memastikan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Luwu timur. Indikator kegiatan adalah tersedianya gaji dan tunjangan, laporan keuangan

bulanan/triwulanan/semesteran yang disusun tepat waktu . Tahapan target rencana aksi pada triwulan IV, adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 2 subkegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan adalah besaran anggaran yang dibayarkan kepada PNS berupa gaji pokok dan tunjangan yang menjadi pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ini dibuat untuk memastikan bahwa pegawai mendapatkan hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku dan menjadi dasar penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah. Untuk triwulan IV. ditargetkan untuk penyusunan Rencana Kerja APBD 2026 dan APBD-P 2025, dengan rencana aksi pengumpulan data penambahan pegawai untuk menyusun kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan yang kemudian akan dituangkan pada dokumen renja APBD 2026 dan APBD-P 2025. Untuk keuangan tidak terealisasi 100%, hal ini karena aacrres 2,5 % 2 Kekurangan tunjangan fungsional yang kami siapkan mulai dari tahun 2021 seharusnya dibayar sesuai SK fungsionalnya tetapi krn blum ada penetapan dari Pejabat pembina, yg dijadikan dasar sehingga belum direalisasikan 3. Untuk pegawai bujang kami siapkan 12% untuk persiapan tunjangn anak dan istri, 4 orang penyediaan gaji untuk jabatan pelaksana yg kosong 4 org, sesuai anjab. Untuk selanjutnya memperhatikan dan menghitung dengan teliti untuk perencanaan anggaran gaji tahun berikutnya.
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD adalah proses penyusunan laporan keuangan SKPD berupa laporan realisasi keuangan, neraca, dan catatan atas laporan keuangan SKPD. Terealisasi seluruhnya
- 3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah** adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum barang dilingkup DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Indikator kegiatan adalah persentase barang milik daerah yang ditatausahakan. Tahapan target rencana aksi pada

kegiatan ini adalah Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 1 subkegiatan antara lain :

- a. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah adalah proses pengumpulan data penghuni yang ada pada rusunawa sumasang untuk menindaklanjuti perintah Pimpinan agar tidak ada lagi biaya sewa pada rusun tersebut, rusunawa ASN dan memastikan bahwa data yang terkumpul akurat dan lengkap. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 1 subkegiatan adalah pelaporan pengelolaan Retribusi Daerah adalah proses perhitungan jumlah retribusi.

5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah adalah proses dan tugas yang berkaitan dengan manajemen dan pengelolaan administrasi pegawai dilingkup DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Indikator kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan administrasi yang dibutuhkan pegawai serta menganalisis jabatan dan beban kerja pada DPKPP Kabupaten Luwu Timur. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 2 subkegiatan antara lain :

- a. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah proses mengumpulkan informasi pegawai dan memastikan bahwa data yang terkumpul akurat dan lengkap. Rencana aksi pada triwulan IV yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah pengolahan administrasi pegawai antara lain administrasi gaji dan tunjangan berupa pembuatan Kenaikan gaji berkala, pengelolaan cuti dan presensi serta sosialisasi dan pendampingan pengisian aplikasi E-Kinerja untuk PPPK tahap 2 dan paruh waktu.

b. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan adalah salah peningkatan kapasitas SDM yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tugas dan fungsi.

6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah adalah proses pencatatan, pembukuan, surat menyurat, kearsipan, dan lain sebagainya. Indikator kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi kebutuhan administrasi komponen instalasi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, kebutuhan logistik, kebutuhan barang cetak dan penggandaan, bahan bacaan, fasilitasi kunjungan tamu. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 8 subkegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor adalah kegiatan yang menyediakan peralatan dan alat-alat yang mendukung penerangan bangunan.
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah proses pencatatan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor untuk menunjang kelancaran pekerjaan dan kelancaran administrasi.
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga adalah kegiatan untuk menyediakan peralatan yang dibutuhkan sebagai sarana penunjang.
- d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah proses pencatatan kebutuhan bahan logistik.
- e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah menyediakan barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran.
- f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan wawasan mengenai berita yang sedang beredar.
- g. Fasilitasi Kunjungan Tamu adalah kegiatan yang menyediakan kebutuhan makan dan minum untuk tamu.
- h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah kegiatan yang meliputi penyelenggaraan rapat koordinasi dan perjalanan dinas. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi rapat koordinasi dan

perjalanan dinas, memastikan kegiatan administrasi perkantoran dapat berjalan efektif dan efisien, meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membantu koordinasi dengan instansi terkait.

- 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** adalah penyelenggaraan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya jasa pelayanan umum kantor agar dapat meningkatkan kinerja petugas pelayanan kantor dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Indikator kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah. Tahapan target rencana aksi pada kegiatan ini adalah laporan penyediaan jasa surat menyurat, laporan penyediaan jasa komunikasi, SDA dan Listrik, laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 3 subkegiatan antara lain :
- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat adalah pencatatan administrasi surat masuk dan surat keluar.
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik adalah proses pendataan kebutuhan air dan Listrik.
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah proses pendataan tenaga upah jasa pada DPKK. Terdiri dari belanja honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga keamanan, belanja jasa tenaga supir.
- 8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah** adalah kegiatan untuk menjaga dan mempertahankan kondisi fisik bangunan, peralatan, dan mesin yang mendukung urusan pemerintah daerah. Indikator kegiatan adalah persentase BMD yang layak fungsi. Adapun tahapan yang dilakukan untuk mendukung kegiatan yang tertuang pada indikator tersebut, dicapai pada 3 subkegiatan antara lain :
- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan adalah proses pendataan kendaraan dinas yang layak fungsi.
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah mencakup pemeliharaan layanan terjadwal secara berkala, pemeriksaan rutin, dan perbaikan

terjadwal maupun darurat. Perawatan ini juga mencakup penggantian atau penyeselarasan ulang komponen yang aus, rusak, atau tidak selaras. Rencana aksi pada triwulan II yang dilaksanakan pada subkegiatan ini adalah belanja pemeliharaan print, laptop, AC, mesin babat.

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah untuk menjaga kelayakan fungsi bangunan gedung dan prasarannya.

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran pada APBD Sekretariat DPKPP Kabupaten Luwu Timur sebesar RP. 6.266.892.544,- (Enam Milyar Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Empat Rupiah), terealisasi sebesar Rp. 4.565.633.591 (Empat Milyar Lima Ratus Enam Puluh Lima Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah). Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 20
Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
	Rp	Rp	Rp
			REALISASI/PAGU X 100%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.266.892.544	4.565.633.591	72,85%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.317.000	108.540.365	85,93%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.948.000	51.466.988	84,44%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.000.000	3.115.770	62,32%
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.000.000	4.254.630	85,09%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.369.000	49.702.977	89,77%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.495.294.144	3.011.910.593	67,00%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.429.798.404	2.951.062.891	66,62%

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
	Rp	Rp	Rp
			REALISASI/PAGU X 100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	65.495.740	60.847.702	92,90%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.824.000	17.060.000	81,92%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.824.000	17.060.000	81,92%
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	7.155.000	6.840.000	95,60%
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	7.155.000	6.840.000	95,60%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	117.864.800	69.850.793	59,26%
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	33.668.800	26.989.682	80,16%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	84.196.000	42.861.111	50,91%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	589.146.400	578.242.307	98,15%

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
	Rp	Rp	Rp
			REALISASI/PAGU X 100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.835.000	4.208.000	72,12%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	311.088.100	307.980.600	99,00%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.322.900	15.842.900	97,06%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.320.000	10.924.000	96,50%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	16.320.000	15.820.000	96,94%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.736.000	11.812.000	75,06%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.524.400	211.654.807	99,59%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	129.200.000	107.214.900	82,98%
Pengadaan Mebel	70.200.000	65.379.000	93,13%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59.000.000	41.835.900	70,91%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	272.691.200	177.085.271	64,94%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.261.400	9.688.533	94,42%

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN
	Rp	Rp	Rp
			REALISASI/PAGU X 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	141.949.800	77.576.738	54,65%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	120.480.000	89.820.000	74,55%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508.400.000	488.889.362	96,16%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52.150.000	48.160.072	92,35%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.250.000	25.654.000	79,55%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	424.000.000	415.075.290	97,90%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur tahun 2021–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur triwulan IV Tahun 2025.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan IV Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

Malili, 31 Desember 2025

SEKRETARIS,

IWAN SETIAWAN, ST

Pangkat Pembina Tk.I

NIP 1977100220050210



DOKUMENTASI DESK ANJAB



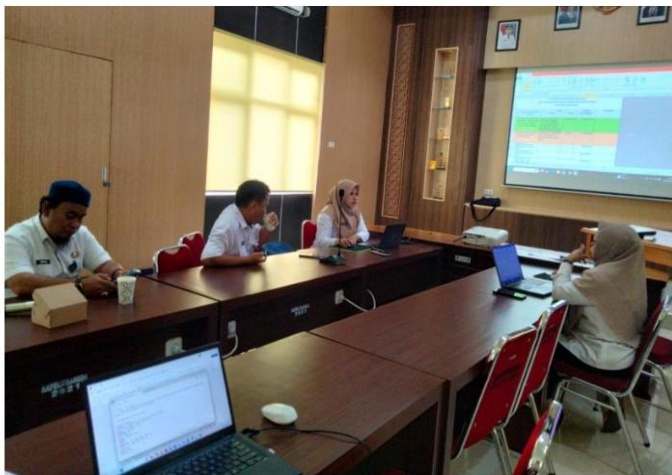
DESK PENGUSULAN UPAH JASA



EVALUASI LAKIP PERTRIWULAN TAHUN 2025



EVALUASI RANCANGAN AKHIR RENJA TAHUN 2026





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN IV

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan pada sekretariat Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), maka terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kehadiran ASN dan Upah jasa;
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyusunan laporan keuangan dan Kinerja APBD-P 2025;
2. Kepala Bidang Perumahan
 - a. Percepatan proses penertiba rumah susun Sumasang;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi subkegiatan sesuai dengan target perencanaan PSU Perumahan.
3. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman
 - a. Monitoring dan evaluasi pekerjaan fisik APBD-P 2025;
 - b. Percepatan penyusunan kebijakan untuk Perda RP3KP;
4. Kepala Bidang Pertanahan
 - a. Melakukan koordinasi dengan bidang aset pada BKAD dan BPN terkait pengusulan persertifikatan aset Pemda, penetapan lokasi dan pengadaan tanah terkait dengan program prioritas Bupati terpilih.

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Sekretariat dan Bidang-bidang pada DPKPP.

Malili, 31 Desember 2025
Kepala DPKPP

Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 197403232003121004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN IV

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), maka terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kasubag Umum dan Keuangan
 - a. Melakukan percepatan penyusunan neraca dan LRA Tahun 2025.
 - b. Percepatan dalam proses kelengkapan administrasi bahan evaluasi oleh Inspektorat dan BPK.
 - c. Melakukan monitoring realisasi keuangan setiap kegiatan.
2. Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian
 - a. Melakukan percepatan penyelesaian dokumen terkait sub bagian perencanaan Tahun 2025.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai.

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Sekretariat DPKPP.

Malili, 31 Desember 2025

SEKRETARIS,

IWAN SETIAWAN, ST

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 1977100220050210



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
KEPALA BIDANG DAN SEKRETARIS PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Para Kepala Bidang dan Sekretaris pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 31 Desember 2025
Kepala DPKPP

Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 197403232003121004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
PARA KEPALA SUBBAGIAN PADA
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian dan Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 31 Desember 2025
Yang Melakukan Evaluasi
Sekretaris

IWAN SETIAWAN, ST
Pangkat: Pembina
NIP: 1977100220050210

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV

**BIDANG SARANA, PRASARANA DAN
PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN**



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**

TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman serta pelayanan dasar masyarakat. Pembangunan infrastruktur permukiman yang memadai dan berkelanjutan menjadi salah satu prioritas dalam upaya mewujudkan kawasan hunian yang layak, sehat, aman, dan terjangkau.

Seiring dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan, diperlukan suatu sistem pelaporan yang dapat menggambarkan capaian kinerja secara periodik. Laporan Kinerja Triwulan IV ini disusun untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus sebagai dasar pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman dimaksudkan untuk mendokumentasikan seluruh capaian pelaksanaan kegiatan selama periode Triwulan tertentu, serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur atas hasil kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman antara lain:

1. Menyajikan informasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman secara periodik (Triwulanan).
2. Melakukan evaluasi terhadap tingkat capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan.
3. Mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk optimalisasi pelaksanaan program

dan kegiatan di periode berikutnya.

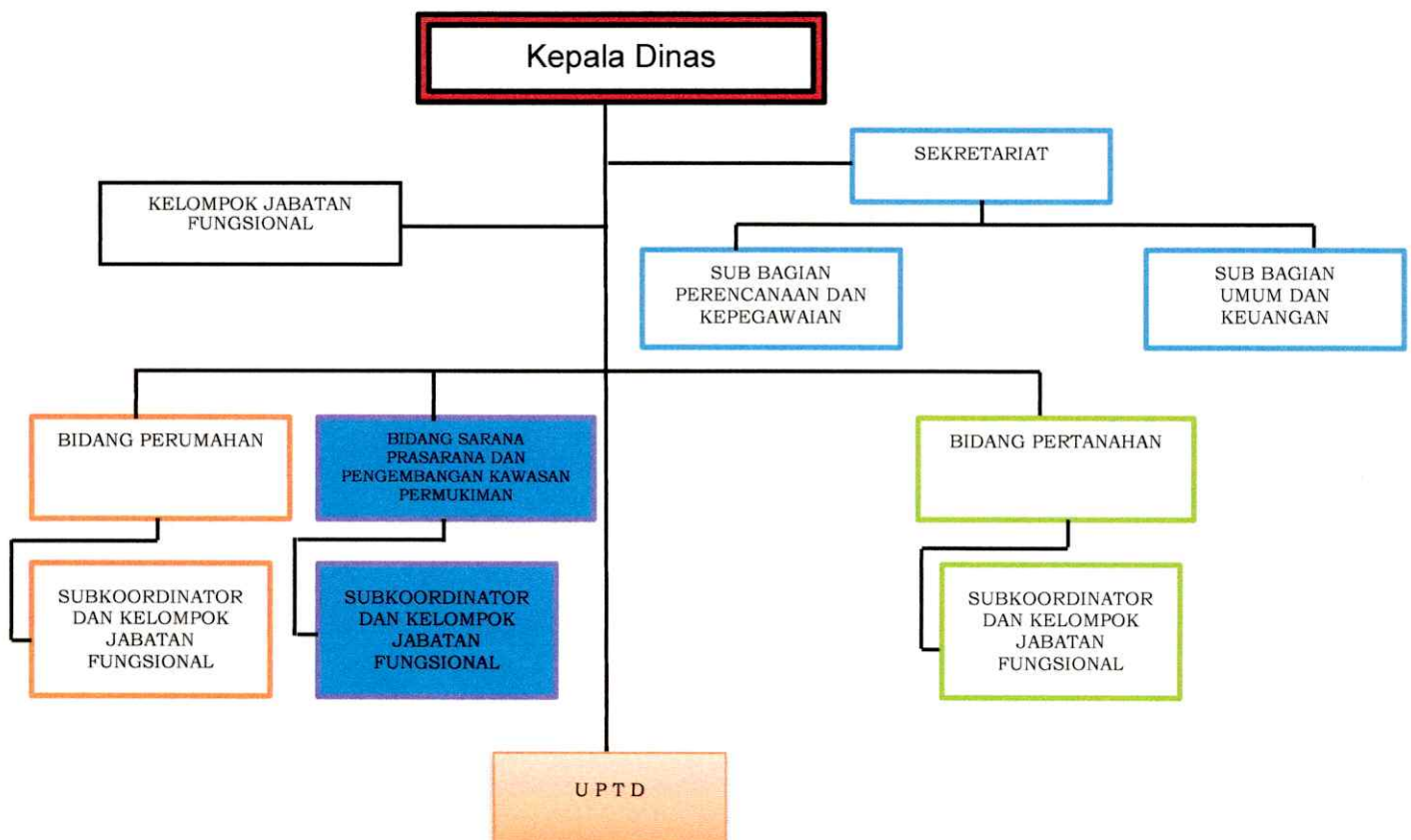
5. Mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaporan yang transparan dan akuntabel.

C. GAMBARAN UMUM BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Struktur Organisasi Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, seperti termuat pada bagan di bawah ini sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Pemukiman melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang bangunan gedung dan prasarana permukiman;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pengembangan kawasan permukiman; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan bidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- g. melaksanakan penyusunan rencana teknik dibidang penyelenggaraan sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- h. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- i. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, sosialisasi dan supervisi dibidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- j. melaksanakan fasilitasi penyediaan lahan bagi penyelenggaraan kawasan permukiman;
- k. melaksanakan kegiatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum perumahan;
- l. melaksanakan dan memberikan dukungan fasilitasi pelayanan perizinan dalam bentuk penerbitan pertimbangan teknis berkaitan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan izin dibidang sarana prasarana dan pengembangan kawasan permukiman;
- n. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
- o. menilai kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

DPKPP Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2025 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi SDM Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Sub Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman	9	5	14

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia pada Triwulan IV tahun 2025 sebanyak 14 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 9 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 5 orang.

Tabel 1.2

Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No	Sub Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	2	3	4	5	6	7		9
1.	Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman	-	13	-	-	-	1	14

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah pegawai pada Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada Triwulan IV tahun 2025, berdasarkan jenjang pendidikan S1 sebanyak 13 orang dan jenjang pendidikan SMA sebanyak 1 orang.

TABEL 1.3

Komposisi SDM

**Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman
Berdasarkan Jenjang Golongan/Eselon Tahun 2025**

No	Jenjang Golongan / Eselon / Staf (Upah Jasa)	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Staf	-	-	0
	Ila	1	-	1
2	III a	3	5	8
3	III b	-	-	-
4	III c	1	-	1
5	III d	2	-	2
6	IV a	2	-	2
Total		9	5	14

Dari tabel 1.3 diperoleh bahwa Komposisi Sumber Daya Manusia pada Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada Triwulan IV tahun 2025 berdasarkan Jenjang Golongan/Eselon/Staf sebanyak 14 orang, terdiri dari: Golongan II/a sebanyak 1 orang, III/a sebanyak 8 orang, III/c sebanyak 1 orang, III/d sebanyak 2 orang dan IV/a sebanyak 2 orang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Sesuai dengan Visi Luwu Timur yaitu **"LUWU TIMUR yang berkelanjutan dan Lebih maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya"**.

2. Misi

Untuk mewujudkan **Visi** yang telah ditetapkan, maka diperlukan **Misi**. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 melaksanakan **Misi** ke-3 (M3) dan **Misi** Ke-4 (M4) yaitu :

1. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3);
2. Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik (M4).

3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dan Layanan Pertanahan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

1. Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak;
2. Tersedianya Tanah Untuk Kepentingan Umum;

3. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Tabel 2.1

**Sasaran dan Indikator Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur
Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
TUJUAN 1 : Mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dan Layanan Pertanahan Berkelanjutan	<i>Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah (%)</i>	6,05
SASARAN 1: Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak	<i>Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani (%)</i>	19,27

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama DPKPP Kabupaten Luwu Timur
Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Layak	Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total huni	%	(Jumlah seluruh rumah tidak layak huni (RTLH) – Jumlah RTLH yang ditangani) / Jumlah seluruh Rumah) x 100%	Laporan Bidang Perumahan dan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan dan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	%	(Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani/luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha)x 100%	Laporan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

6. Program

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing Sasaran Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3

**Program untuk Pencapaian Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur
Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman**

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
SASARAN 1: Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak	1. Kawasan Permukiman 2. Peningkatan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Pada Triwulan IV Tahun 2025. Sasaran, indikator, target kinerja Program disajikan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Atas Perjanjian Kinerja (terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu Triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan IV. Dalam bab ini juga akan disajikan realisasi keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan IV Tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA DPKPP KABUPATEN LUWU TIMUR TRIWULAN III

1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun Capaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah	100	100	100
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di Bawah 10 Ha yang Tertangani	100	75	75

2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Sasaran Strategis I

Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur
Kawasan Permukiman Yang Layak

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak	Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah	100	100	100
		Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di Bawah 10 Ha yang Tertangani	100	75	75

3. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran I memiliki 2 indikator yaitu : Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah dan Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di Bawah 10 Ha yang Tertangani.

➤ Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : $((\text{Jumlah Seluruh Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)} - \text{Jumlah RTLH yang Ditangani}) / \text{Jumlah Seluruh Rumah}) \times 100\%$. Indikator sasaran ini, dengan target 6,05% belum ada realisasi disebabkan masih pada tahap perencanaan untuk masing-masing program yang mendukung tercapainya sasaran ini. Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni yang disinkronkan dengan beberapa kegiatan dan program, yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang beririsan dengan DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yaitu Dinas PUPR, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial dan P3A. Salah satu strategi dalam penurunan jumlah rumah tidak layak huni adalah peningkatan kapasitas

Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan dan pemutakhiran data RTLH pada aplikasi e-RTLH, sehingga penanganan RTLH dapat tercapai dengan tepat sasaran dan maksimal. Mengacu kepada IKU Kepala Daerah, terkait pengukuran indeks daya saing infrastruktur daerah, maka DPKPP Kabupaten Luwu Timur beserta stakeholder lainnya mempunyai tugas untuk mencapai indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah, salah satunya peningkatan rumah tidak layak huni.

➤ **Persentase kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang Tertangani**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : “Luas kawasan di bawah 10 ha yang ditangani dibagi luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha dikali seratus persen”. Indikator sasaran ini, dengan target 100% sudah ada realisasi 75%, untuk masing-masing program yang mendukung tercapainya sasaran ini. Realisasi yang diperoleh merupakan hasil pelaksanaan penanganan dan pencegahan kawasan kumuh melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu instrument untuk mengukur IKU Kepala Daerah terkait pengukuran Indeks Daya Saing Infrastruktur Daerah.

Rencana aksi untuk mendukung Sasaran I adalah peningkatan kapasitas ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penyediaan hunian, peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan permukiman.

❖ Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran I yaitu :

✚ Program Kawasan Permukiman

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman
2. Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha
3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

✚ Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 9

Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran I	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak						Target Tahun 2025 (%)
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan Sebelumnya			Triwulan IV			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah	73,73	75,00	97,33	100	100	100	100
Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani	73,53	50.00	68,50	100	95	95	95

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan untuk Capaian Triwulan IV sudah realisasi 100% untuk Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Terhadap Total Rumah sementara untuk Persentase Kawasan Kumuh Kabupaten di bawah 10 ha yang tertangani saat ini realisasi 95%.

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Target Jangka Menengah

Belum ada capaian pada Triwulan IV, dapat dijelaskan penentuan target pada Sasaran I pada masing-masing indikator jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah :

- ✚ Persentase penurunan jumlah rumah tidak layak huni terhadap total rumah, target ditetapkan mengacu pada realisasi yang diperoleh pada tahun 2025, hal ini Target yang ditetapkan mengacu pada realisasi yang diperoleh pada tahun 2025, hal ini dikarenakan target pada Renstra telah tercapai. Banyak faktor yang mendukung tercapainya indikator, diantaranya adalah kolaborasi dengan beberapa stake holder antara lain PUPR terkait layanan keciptakarya air minum, sanitasi, drainase, penerangan jalan, Dinas Lingkungan Hidup program persampahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Bantuan Keuangan Khusus dengan program bedah rumah, Dinas Kesehatan pada program pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan dan pelaksanaan kesehatan bersumber daya masyarakat kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada program penanggulangan bencana
- ✚ Persentase kawasan kumuh Kabupaten di bawah 10 Ha yang tertangani, target yang ditetapkan mengacu pada target pada jangka menengah tahun 2025, hal ini dikarenakan target pada tahun 2024 belum tercapai.

4. Perbandingan dengan Target Nasional (Rumah Layak Huni)

Pada Triwulan III belum ada perbandingan yang dapat dihitung dengan target Nasional. Pada tahun sebelumnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mencatat capain program sejuta Rumah Tahun 2025 mencapai Program Sejuta Rumah (PSR) Tahun 2023 mencapai 1.217.794 unit. Capaian yang berasal dari kontribusi Kementerian PUPR seperti Direktorat Jenderal Perumahan (DJP) dan Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrstruktur (DJPI), Kementerian/Lembaga (K/L) Lain, Pemerintah Daerah, Pengembang rumah bersubsidi dan rumah komersial dan masyarakat tersebut meliputi 1.010.142 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 207.652 unit non MBR.

Program Kawasan Permukiman

Program kawasan permukiman merupakan aksi dan inisiatif yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperbaiki infrastruktur dan mengembangkan lingkungan yang berkelanjutan. Sasaran program ini adalah meningkatnya rumah layak huni dan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani. Indikator program tahun 2025 ada 2 yaitu :

- a. Rasio rumah layak huni, dengan formulasi jumlah rumah layak huni dibagi jumlah penduduk. Target Triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, yaitu penyusunan draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Bedah Rumah, yang pada Triwulan IV terlaksana 25%, untuk target kinerja direncanakan pada Triwulan IV
- b. Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha yang ditangani, dengan formulasi luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani dibagi luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha. Target Triwulan IV adalah 25% dengan capaian realisasi 25%. Capaian tersebut berasal dari rencana aksi penginputan paket kegiatan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Pengadaan (SIRUP).

Pada tahun 2025, Program Kawasan Permukiman didukung oleh 3 kegiatan utama yaitu:

- Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman adalah proses yang diatur oleh peraturan pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang, standar teknis dan persyaratan lingkungan yang berlaku. Indikator kegiatan adalah Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Aktifitas pada kegiatan ini adalah penyusunan dokumen dari hasil koordinasi dengan Forum Penataan Ruang Daerah (FPRD), dengan menghasilkan pertimbangan teknis kesesuaian kegiatan dengan pemanfaatan ruang , substansi standar teknis pemenuhan upaya pengelolaan lingkungan dan pertimbangan teknis lainnya yang dibutuhkan pada proses pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi 25% terealisasi hanya 10%. Pencapaian rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV.

Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan permukiman, aktifitas subkegiatan ini adalah kegiatan koordinasi teknis rencana pembangunan, penyusunan Peraturan Bupati Luwu Timur tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi, terealisasi 25% dengan capaian rencana aksi 25% dan rencana kerja 100% dari 1 dokumen yang ditargetkan pada Triwulan IV.
- Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mengatasi masalah permukiman yang tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas kegiatan ini adalah penyusunan dokumen yang dijadikan acuan dalam melaksanakan penyelesaian masalah perumahan dan permukiman kumuh. Indikator, Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi. Indikator kegiatan ini adalah jumlah kegiatan pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi, terealisasi 10% dengan capaian rencana aksi 40% dan rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - a. Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP adalah review Renacana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dan penyusunan dokumen Rencana Tata Letak Bangunan (RTLBB), dengan indikator jumlah dokumen kebijakan bidang PKP yang tersusun/terreview/terlegalisasi. Terealisasi 10% dengan capaian rencana aksi 40% dan rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV
- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha merupakan salah satu kegiatan dalam upaya mengatasi masalah perumahan yang tidak layak huni dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Aktifitas kegiatan ini berfokus pada perbaikan infrastruktur, sanitasi, kesehatan dan lingkungan, yang merupakan perwujudan untuk pencegahan kawasan kumuh dan perolehan rumah layak huni. Indikator pada kegiatan ini ada 2 yaitu :

- Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dengan formulasi “jumlah rumah tangga MBR yang menempati rumah layak huni dan terjangkau pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah rumah tangga MBR pada kurun waktu tertentu”. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi % dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV.
- Luas penanganan infrastruktur kawasan kumuh (Ha), aktifitas untuk memperoleh indikator ini adalah penanganan dan pencegahan kawasan kumuh dengan kegiatan pembangunan dan peningkatan. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 10% dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV.

Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, aktifitas pada kegiatan ini adalah mengidentifikasi rumah tidak layak huni dan melakukan penanganan dengan berkoordinasi dengan aparat Desa sebagai pelaksana bedah rumah yang dilaksanakan di Desa dengan menggunakan BKK dan fasilitator sebagai pelaksana BSPS dengan anggaran yang bersumber dari APBN. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 10% dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi karena ditargetkan pada Triwulan IV.
- b. Subkegiatan Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh, aktifitas pada kegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan fisik dan pemeliharaan untuk prasarana yang termasuk dalam kawasan kumuh dan yang merupakan aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang dimulai dari penyusunan perencanaan **Detail Engineering Design**, pembangunan dan pengawasan. Indikator, luas permukiman yang dipugar. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% hanya terealisasi 10% dengan capaian 40%. Target rencana kerja belum terealisasi

karena ditargetkan pada Triwulan IV. Berikut tabel capaian program
Kawasan Permukiman,

Tabel 11

Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Kawasan Permukiman

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
					I	II	III	IV		
1	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	8.102.221.747	Rasio rumah layak huni	18,94%	25%	25%	25%	25%	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman	
			Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	16,71 %	25%	25%	25%	25%		
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	64.740.500	Jumlah dokumen pendukung terkait izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang difasilitasi	1 Dokumen	25%	25%	25%	25%		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	64.740.500	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan kawasan permukiman	4 Laporan	25%	25%	25%	25%		

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				PENANGGUNG JAWAB	KET
					I	II	III	IV		
	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	469.825.000	Luas penanganan infrastruktur kawasan kumuh	14,2 Ha	25%	25%	25%	25%		
	Penyusunan/Revisi/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	469.825.000	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Terevisi/Terlegalisasi (Dokumen)	2 Dokumen	25%	25%	25%	25%		
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	7.567.656.247	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau dan responsif gender	70.62%	25%	25%	25%	25%		
			Luas penanganan infrastruktur kawasan kumuh	14,20 ha	25%	25%	25%	25%		
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.196.732.000	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki (Unit Rumah)	105 unit Rumah	25%	25%	25%	25%		
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	5.370.924.247	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar (Ha)	14,20 Ha	25%	25%	25%	25%		

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada Triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan IV Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

Malili, 8 Januari 2026

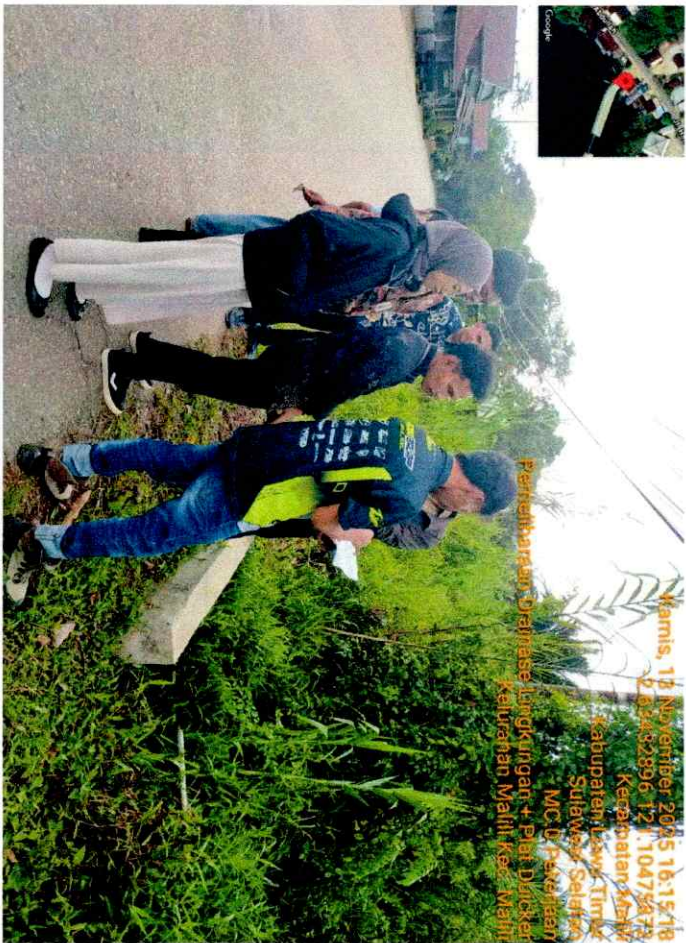
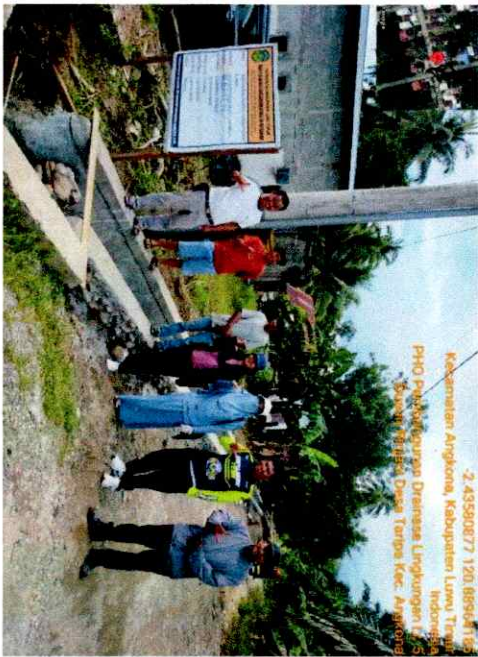
Kepala Bidang,

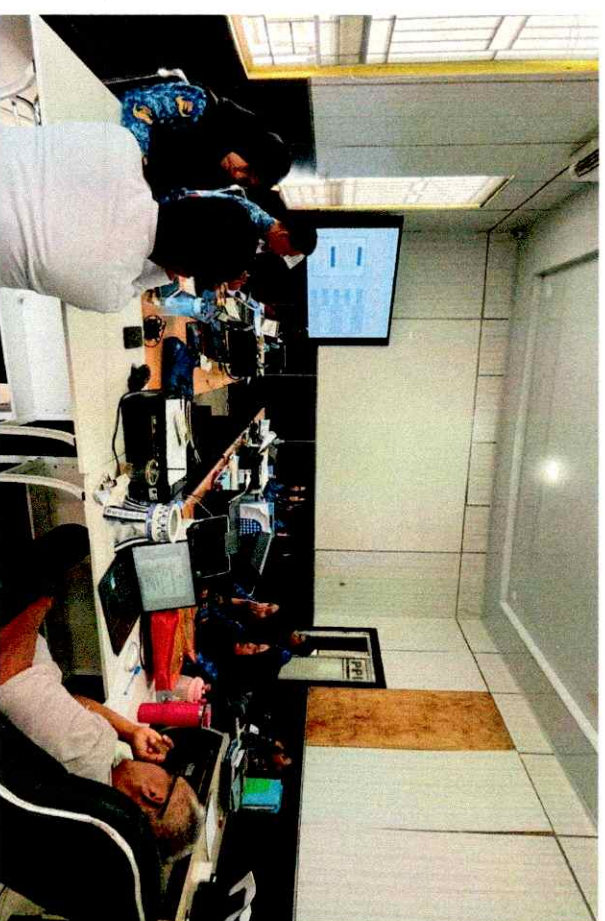
JANTE SAMPE, ST

Pangkat : Pembina

NIP : 198002102009021003

Lampiran
Dokumentasi Pendukung









PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
PERMUKIMAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 02 Januari 2026
Yang Melakukan Evaluasi
Kepala Dinas

Drs. H. Bahri Suli., MM
Pangkat: Pembina UtamaMadya
NIP: 196606201986031007



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA BIDANG SARANA PRASARANA
DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN PADA DINAS
PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Para Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bidang Sarana Prasarana Dan Pengembangan Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 02 Januari 2026
Yang Melakukan Evaluasi
Kepala Bidang

JANTE SAMPE, ST
Pangkat: Pembina, IV/a
NIP: 19800210 200902 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

Jl. Soekarno – Hatta, Malili, Kodepos 92981
Telepon : (0474) 321-634, Fax. : (0474) 321-634

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN IV

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan pada bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan IV, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional

- a. Melakukan review substantif terhadap progress penyusunan dokumen RP3KP;
- b. Memverifikasi kelengkapan data teknis seperti data profil kumuh, peta tematik, dan dokumen pendukung lainnya;
- c. Melakukan Monitoring Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase di beberapa daerah yang tersebar di kab. Luwu Timur
- d. Melakukan Asistensi DED Peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase di beberapa daerah yang tersebar di kab. Luwu Timur
- e. Melakukan verifikasi teknis RAB penerima bantuan dan memastikan
- f. Melakukan Penyelesaian Berkas Administrasi Pencairan atas paket pekerjaan peningkatan Jalan dan Pembangunan Drainase

2. Pelaksana

- a. Melakukan persiapan administrasi rapat koordinasi, termasuk penyediaan data dan dokumen pendukung;
- b. Membantu pelaksanaan monitoring lapangan bersama pejabat fungsional.

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang-bidang pada DPKPP.

Malili, 02 Januari 2026
Kepala Bidang Sarana Prasarana dan
Pengembangan Kawasan Permukiman,

JANTE SAMPE, ST

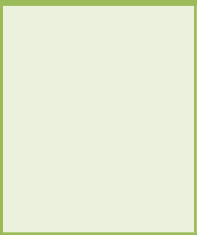
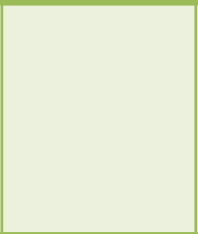
Pangkat : Pembina

NIP : 19800210 200902 1 003



Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

BIDANG PERTANAHAN



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN

KABUPATEN LUWU TIMUR



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanahkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran (DPA). Untuk itu, di dalam Laporan Kinerja akan diuraikan mengenai perjalanan suatu instansi dari awal sampai dengan habis berlakunya tahun anggaran.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja triwulan IV DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 adalah sebagai penjabaran visi dan misi yang terwujud dalam tingkat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

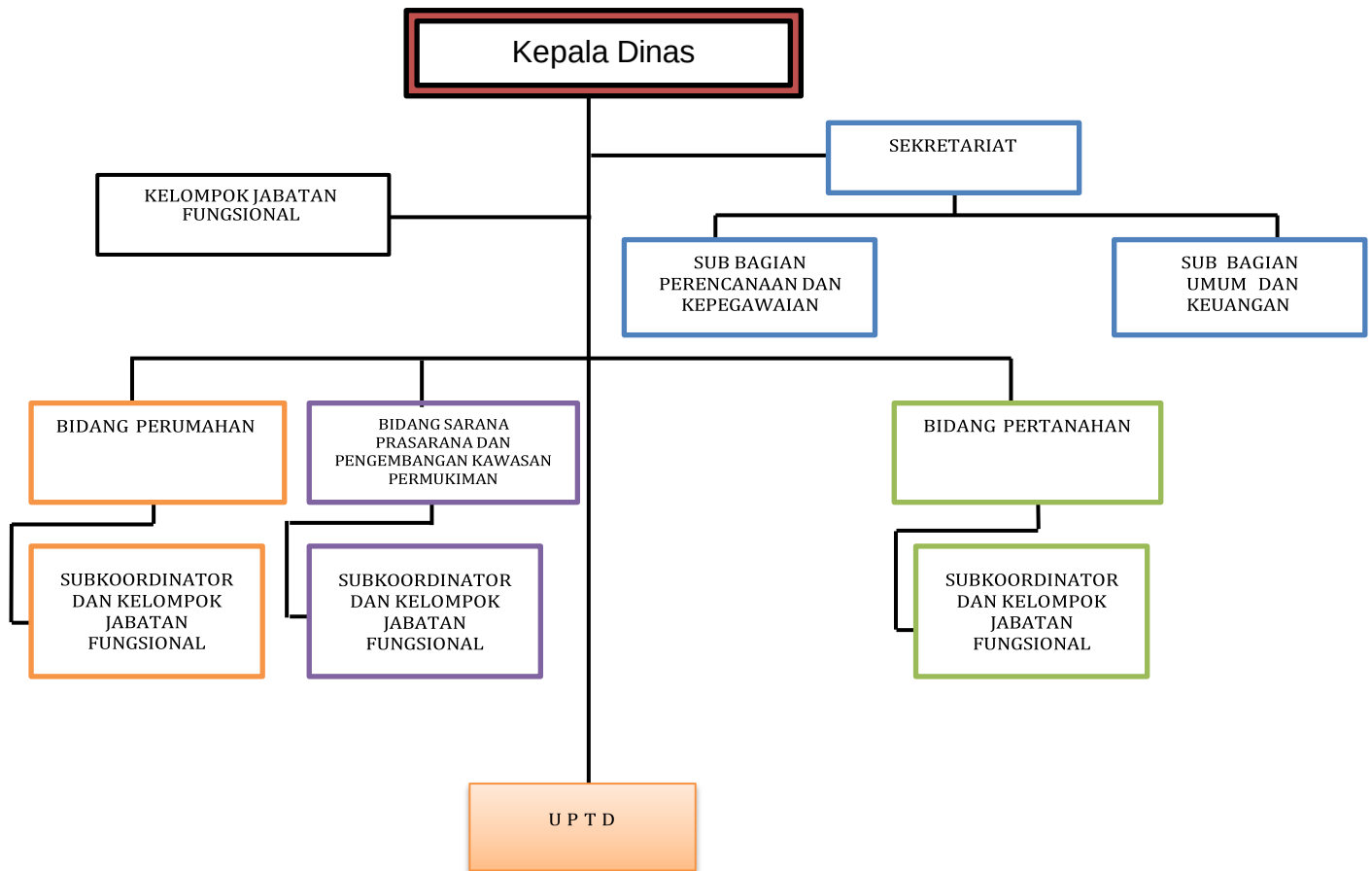
Tujuan Penyusunan laporan kinerja triwulan IV DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah untuk memberikan kinerja yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan kesinambungan bagi DPKPP Kabupaten Luwu Timur untuk meningkatkan kinerjanya

C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Struktur Organisasi

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, seperti termuat pada bagan di bawah ini sebagai berikut :

STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok DPKPP Kabuapten Luwu Timur Sesuai dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur adalah membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan Pemerintah bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fungsi secara singkat, fungsi pokok dari DPKPP Kabuapten Luwu Timur di bidang pertanahan, yaitu merumuskan kebijakan teknis di pertanahan

3. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam menjalankan tugasnya, mempunyai bidang yang berkaitan dengan penanganan, penyiapan, pengadaan dan pensertifikatan atas tanah aset pemda yaitu **Bidang Pertanahan**. Tentunya dalam pencapaian dan penyelenggaraan tugasnya ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Bidang Pertanahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup Bidang Pertanahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2025 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

Tabel 1.1
Komposisi SDM Bidang Pertanahan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No.	Sub Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Bidang Pertanahan	4	3	7

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia pada akhir tahun 2025 sebanyak 7 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 4 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 3 orang.

Tabel 1.2
Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2024

No	Sub Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	2	3	4	-	-	-	-	9
1.	Bidang Pertanahan	1	5	-	-	-	1	7

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah Pegawai Bidang Pertanahan berdasarkan jenjang pendidikan, S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 5 orang dan SMA sebanyak 1 orang.

TABEL 1.3
Komposisi SDM
Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2025

No	Jenjang golongan/Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	II a	-	1	1
2	III a	1	2	3
3	III d	2	-	2
4	IV a	1	-	1
Total		3	2	5

Dari tabel 1.3 komposisi sumber daya manusia berdasarkan jenjang golongan sebanyak 7 orang, terdiri dari golongan II/a sebanyak 1 orang, golongan III/a sebanyak 3 orang, golongan III/d sebanyak 2 orang dan golongan IV/a sebanyak 1 orang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Sesuai dengan Visi Luwu Timur yaitu **"LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA"**.

2. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka di perlukan misi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 melaksanakan Misi ke-3 (M3), Ke-5 (M5) yaitu :

- a. Mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah yang merata dan berkeadilan
- b. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani efektif, efesien danbersih melalui transfarmasi digital.

3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah :

- a. Terciptanya Konektivitas wilayah untuk pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi (T3)
- b. Terwujudnya tata kelola pemerintahan berintegrasi dan adaptif (T6)

4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran DPKPP **Bidang Pertanahan** Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

- a. Meningkatnya kualitas infstruktur daerah ;
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah daerah.

Tabel 2.1
Sasaran dan Indikator Kinerja DPKPP Bidang Pertanian
Kabupaten Luwu Timur

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
TUJUAN 1 : Mewujudkan perumahan, kawasan permukiman yang layak huni dan layanan pertanian berkelanjutan	<i>Cakupan pengelolaan penggunaan dan Pemanfaatan tanah (%)</i>	100
SASARAN 2 Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	<i>Persentase Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Daerah(%)</i>	100

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan IKU sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Bidang Pertanahan
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	%	(Luasan tanah yang dimanfaatkan/Luasan tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x100%	Laporan Bidang Pertanahan	Bidang Pertanahan

6. Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program di bidang pertanahan untuk mendukung masing-masing sasaran Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025
DPKPP Kabupaten Luwu Timur

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
SASARAN 1: Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	1. Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan 2. Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan 3. Pengelolaan Tanah Kosong 4. Pengelolaan Izin Membuka Tanah 5. Penatagunaan Tanah

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Pada Triwulan IV Tahun 2025. Sasaran, indikator, target kinerja Program disajikan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Atas Perjanjian Kinerja (terlampir).

:

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan IV. Dalam bab ini juga akan disajikan realisasi keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan IV Tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA DPKPP KABUPATEN LUWU TIMUR TRIWULAN IV 2025

1. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja triwulan IV Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur bidang Pertanahan triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 3.1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	100	100	100

2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Sasaran Strategis I

Tersedianya tanah untuk kepentingan umum

Tabel 3.2

Target dan Realisasi Kinerja Sasaran III

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	95	95	95

3. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025

Sasaran III memiliki indikator persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah, dengan formulasi “luas tanah yang dimanfaatkan/luas tanah yang menjadi aset Pemerintah Daerah) x 100%. Target indikator sasaran II adalah 95%, terrealisasi mencapai 100 %. Rencana aksi untuk mendukung sasaran III adalah perencanaan pengadaan tanah, identifikasi dan verifikasi tanah aset pemda yang akan dilakukan pengaman dan sertifikasi, penetapan izin lokasi dan penyelesaian kasus tanah.

❖ Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran II yaitu :

✚ Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

1. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota

✚ Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

1. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

✚ Program Pengelolaan Tanah Kosong

1. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah

Kosong ✚ Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

1. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah

✚ Program Penatagunaan Tanah

1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah
Kabupaten/Kota

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian sasaran tersebut, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu :

- ✚ Kurangnya sosialisasi terkait pelayanan tanah;
- ✚ Minimnya kualitas SDM pertanahan;
- ✚ Kurang optimalnya dokumentasi administrasi tanah.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

- ✚ Melakukan sosialisasi melalui media social dan melalui papan informasi publik;
- ✚ Memaksimalkan koordinasi lintas perangkat daerah, maupun instansi vertical Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, terkait pelaksanaan program/kegiatan yang berkontribusi dalam pencapaian pelayanan pertanahan.

❖ Efisiensi Anggaran

Dalam pencapaian sasaran strategis 2, dilakukan beberapa efisiensi anggaran yaitu:

- ✚ Efisiensi anggaran yaitu persertifikatan tanah warga dan tanah rumah ibadah, dimasukkan ke program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, dengan pembebasan Bea Perolehan hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yang merupakan syarat untuk persertifikatan gratis.

❖ Efisiensi Sumber Daya

Dalam pencapaian sasaran 3, dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya yaitu:

✚ Pemanfaatan media sosial dalam penyebaran informasi pelayanan pertanahan;

✚ Komunikasi yang aktif dengan SDM yang ada pada kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Timur, untuk percepatan pelayanan urusan pertanahan

4. Perbandingan antara target dan realisasi triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 9

Perbandingan Target Realisasi Triwulan III Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran I	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum						Target
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan Sebelumnya			Triwulan III			Target Tahun 2025 (%)
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	25%	25%	25%	25%	25%	25%	95%

Berdasarkan tabel di atas belum dapat dijelaskan untuk capaian triwulan IV, hal ini dikarenakan variable-variabel pada formulasi belum terpenuhi nilainya, sehingga belum dapat dihitung.

5. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Target Jangka Menengah

Sudah ada capaian pada triwulan IV, dapat dijelaskan penentuan target pada sasaran II jika dibandingkan dengan target jangka menengah adalah sama.

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan IV	Rata-rata realisasi sampai dengan Triwulan IV	Target Akhir Renstra
1	Tersedianya tanah untuk kepentingan umum	Persentase pemanfaatan tanah milik Pemerintah Daerah	25%	25%	95,00

6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran I

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini merujuk pada proses penyelesaian konflik atau perselisihan yang terjadi terkait kepemilikan atau penggunaan lahan garapan di wilayah Kabupaten Luwu Timur. Indikator, persentase penyelesaian kasus tanah Negara dengan formulasi jumlah kasus yang ditangani dibagi jumlah kasus yang terdaftar kali 100%. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%.

Pada tahun 2025, Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan didukung 1 kegiatan :

- a. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan fasilitasi penyelesaian kasus. Indikator jumlah kasus terdaftar. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja 100% dengan 1 laporan dan 1 untuk realisasi, sehingga capaian 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - 1) Subkegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dan rapat-rapat bersama stakeholder yang terkait dalam memfasilitasi penyelesaian kasus tanah yang bersinggungan dengan aset Pemda yang dilaporkan. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja 100% dengan 1 laporan dan 1 untuk realisasi, sehingga capaian 100%, yaitu permasalahan lahan SDN 122 Dauloloe dan SDN 121 Lampenai Kecamatan Wotu.

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini dirancang oleh Pemerintah untuk memberikan kompensasi yang adil kepada pemilik tanah dan pihak-pihak yang terkena dampak dari proyek pembangunan infrastruktur. Beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam program tersebut adalah pendataan, inventarisasi, konsultasi publik, negosiasi dan kesepakatan, pembayaran ganti kerugian, relokasi dan santunan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan. Indikator Persentase luas lahan yang dibebaskan, dengan formulasi luas lahan yang dibebaskan pada tahun dibagi luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pada tahun n dikali 100%. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan, didukung 1 kegiatan :

- a. Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, bertujuan sebagai fasilitasi pembebasan tanah. Indikator luas lahan kebutuhan pembangunan Kabupaten pertahun pada tahun n (m2). Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan :
 - 1) Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu), aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah yang membutuhkan tanah dengan pelaksanaan perencanaan dengan appraisal untuk menentukan harga tanah. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pelaksanaan pengadaan tanah Lahan Lokasi Pembangunan Jalur 2(dua), Bundaran dan Gerbang Kota Malili, Desa ussu, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur telah realisasi pengadaan tanah dengan luasan 6.555 m2 yang telah dibebaskan. Dan masih ada pembayaran yang akan di bayarkan di tahun anggaran 2026 karena kurangnya anggaran di tahun 2025 untuk pengadaan tanah ini.

Program Pengelolaan Tanah Kosong

Program ini dirancang untuk memanfaatkan tanah kosong atau tidak terpakai di daerah agar dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan. Elemen-elemen utama yang dilaksanakan adalah identifikasi, inventarisasi, pendataan dan pengamanan. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan tanah kosong. Indikator, persentase pengamanan tanah kosong aset Pemerintah Daerah, dengan formulasi jumlah bidang yang dilakukan pengamanan dibagi jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi dikali 100%. Target triwulan III untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target program ini didukung oleh kegiatan,

a. Kegiatan Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong adalah kegiatan untuk menginventarisasi aset pemda untuk diberikan tanda pengenal dengan patok dan papan pengumuman. Indikator, jumlah bidang tanah yang telah dilakukan inventarisasi. Target triwulan III untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh 1 subkegiatan, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan pemberian patok dan papan pengumuman pada tanah aset Pemda yang telah didata

 Subkegiatan Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan pemberian patok dan papan pengumuman pada tanah aset Pemda yang telah didata. Target triwulan 1 untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk kegiatan ini ditargetkan pada triwulan IV. Pada triwulan IV yaitu telah dilakukan Pemasangan batok beton dan papan pengumuman tanah aset pemda Kab. Luwu Timur

Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah

Program ini bertujuan mengatur dan mengelola proses pemberian izin bagi aktivitas pembukaan lahan untuk aset Pemda. Sasaran program ini adalah meningkatnya pengelolaan izin membuka tanah, indikator persentase izin lokasi, formulasi jumlah izin lokasi dibagi permohonan izin lokasi dikali 100%. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target program ini didukung oleh kegiatan,

a. Kegiatan Penerbitan Izin Membuka Tanah, adalah izin yang diberikan untuk penentuan lokasi tanah aset Pemda yang akan dimanfaatkan. Indikator, jumlah dokumen kegiatan Pengendalian pemanfaatan. Target triwulan II untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Pencapaian target ini didukung oleh sub kegiatan

1) Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah, aktifitas sub kegiatan ini adalah pelaksanaan fasilitasi penentuan lokasi dengan penetapan surat keputusan Bupati untuk tanah aset pemda yang akan dimanfaatkan. Target triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Target kinerja untuk triwulan IV ada 4 Dokumen SK yaitu SK Penetapan Lokasi Sekolah Rakyat Kabupaten Luwu Timur, Penetapan Lokasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Malili Kabupaten Luwu Timur, Penetapan Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Malili Kabupaten Luwu Timur, dan Penetapan Lokasi Unut Pengelola Darah Kecamatan Malili Kab. Luwu Timur.

Program Penatagunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota

Program ini adalah upaya pemerintah untuk mengatur, mengelola dan memanfaatkan lahan secara optimal dan berkelanjutan, sesuai dengan rencana tata ruang dan kebijakan penggunaan lahan. Sasaran program ini adalah meningkatnya penatagunaan tanah. Indikator, persentase luas lahan bersertifikat, dengan formulasi luas lahan bersertifikat dibagi luas wilayah seluruh Kabupaten pada tahun n dikali 100%. Target triwulan III untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Untuk kinerja ditargetkan pada triwulan IV. Pencapaian target ini didukung oleh kegiatan,

a. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota, merujuk pada aktivitas pemanfaatan lahan atau tanah yang seluruh wilayahnya terletak dalam batas administrative Kabupaten.

Indikator luas lahan bersertifikat yang difasilitasi. Target triwulan II untuk

- b. rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%.

Pencapaian target ini didukung oleh subkegiatan,

- 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota, aktifitas pada subkegiatan ini adalah fasilitasi persertifikatan aset Pemerintah Daerah, indikator luas lahan bersertifikat yang difasilitasi. Target triwulan I untuk rencana aksi adalah 25%, terlaksana 25%, sehingga capaiannya 100%. Saat ini telah dilakukan Inventarisasi Alas Hak Pensertifikatan Tanah Aset Pemda di Kecamatan Malili, Wotu, Tomoni, dan Mangkutana.

Tabel 11

Capaian Kegiatan/Subkegiatan Sasaran I

N o.	SASAR AN RENSTR A	INDIKAT OR SASARA N RENSTR A	TARG ET KINER JA	TARGET TRIWULAN				PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGA R AN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T TAHUN AN	TARGET TRIWULAN				PENANGG UNG JAWAB
				I	II	III	IV					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	Tersedia nya tanah untuk kepe ntin gan umum	Persenta se Pemanfa atan tanah milik Pemerint ah Daerah	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	PROGRAM PENYELESAI AN SENGKETA TANAH GARAPAN	3,889,900	Persentase terselesaika nnya kasus tanah garapan yang belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi (%)	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	Bidang Pertanian
								Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam daerah Kabupaten/K ota	3,889,900	Jumlah kasus terdaftar	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	
								Mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Ko	3,889,900	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanian dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kot	3 berita acara	25 %	25 %	25 %	25 %	

							ta		a (Berita Acara)						
							PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	9,188,913,950	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	Bidang Pertanian
							Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9,188,913,950	Luas lahan yang dibebaskan pada tahun (Ha)	100.000 m2	25 %	25 %	25 %	25 %	
							Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	9,188,913,950	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah (Dokumen)	3 Dokumen	25 %	25 %	25 %	25 %	
							PROGRAM PENGELOLA	115,982,5	Persentase tanah	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	Bidang Pertanian

								AN TANAH KOSONG	00	kosong yang dikelola (%)						
								Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong	115,982,5 00	Jumlah bidang tanah yang telah diinventarisa si (bidang)	20 Bidang	25 %	25 %	25 %	25 %	
								Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	115,982,5 00	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/K ota yang Diinventarisa si. (Laporan)	4 laporan	25 %	25 %	25 %	25 %	
								PROGRAM PENGELOLA AN IZIN MEMBUKA TANAH	4,844,350	Persentase pengelolaan izin membuka tanah (%)	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	Bidang Pertanahan
								Penerbitan Izin Membuka Tanah	4,844,350	Jumlah permohonan izin membuka tanah yang terdaftar (Izin)	2 Izin	25 %	25 %	25 %	25 %	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	4,844,350	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka	3 dokum en	25 %	25 %	25 %	25 %	

										Pemberian Izin Membuka Tanah (Dokumen)						
								PROGRAM PENATAGUN AAN TANAH	50,061,300	Persentase Luas Lahan Bersertifikat (%)	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	Bidang Pertanian
								Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu daerah Kabupaten/Kota	50,061,300	Luas lahan Pemda tersertifikat	100%	25 %	25 %	25 %	25 %	
								Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	50,061,300	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	4 dokumen	25 %	25 %	25 %	25 %	

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran pada APBD DPKPP Kabupaten Luwu Timur bidang pertanahan sebesar Rp. 9.363.702.000 (Sembilan Milyar Tiga Ratus Juta Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah) .Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut

Table 12 Realisasi Anggaran Triwulan IV 2025 Bidang Pertanian

BAB IV **PENUTUP**

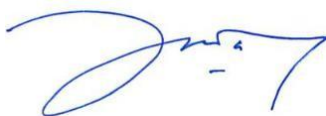
Laporan Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang pertanian pada Triwulan II Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur tahun 2021–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPKPP bidang pertanian Kabupaten Luwu Timur triwulan IV Tahun 2025.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV ini, masih dirasakan belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan IV Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

Malili, Desember 2025

KABID PERTANAHAN



INDRA WIJAYA, SH

Pangkat : Pembina

NIP : 19780802 200803 1 001

Lampiran
Dokumentasi Pendukung Sasaran II

1. Pembayaran Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak Pengadaan Tanah

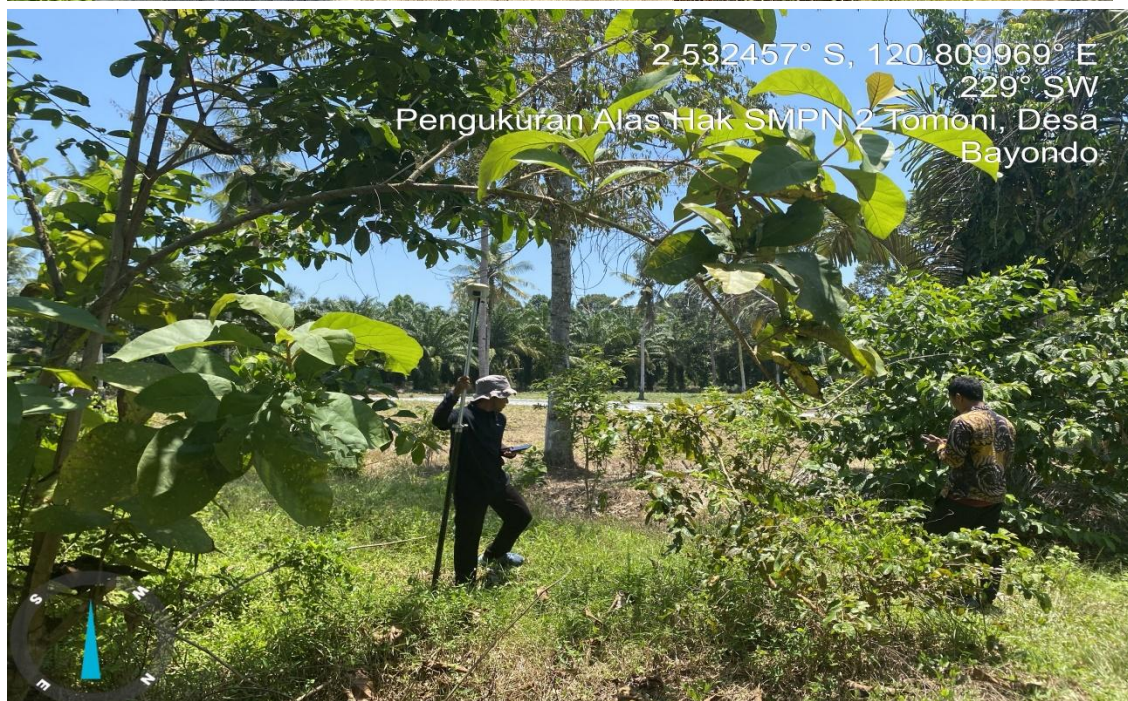


2. Kegiatan Inventarisasi Tanah Kosong





3. Kegiatan Pensertifikatan Tanah Aset Pemda





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
KEPALA BIDANG PERUMAHAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 02 Januari 2026
Yang Melakukan Evaluasi
Kepala Dinas



Drs. H. BAHRI SULI., MM
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP: 196606201986031007



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Fungsional Analis Kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 02 Januari 2026
Yang Melakukan Evaluasi
Kepala Dinas



INDRA WIJAYA, S.H.,M.H.

Pangkat: Pembina, IV/a

NIP: 19780802 200803 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili, Kodepos 92981
Telepon : (0474) 321-634, Fax. : (0474) 321-634

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN IV

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan bidang pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), rekomendasi pada triwulan III terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan IV, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda
 - a. Melakukan Koordinasi dan konsultasi Apraisal penilai tanah dengan KJPP RINALDI ALBERT BAROTO Dan REKAN.
 - b. Membuat draf SK Penetapan Penerima dan Besaran Nilai Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Lokasi Bundaran Ruas Tarengge-Batas Kota Malili;
 - c. Melakukan Koordinasi dan konsultasi Dengan Dinas Sosial mengenai Penetapan Lokasi Sekolah Rakyat .
 - d. Melakukan Koordinasi dan konsultasi Dengan Dinas kesehatan mengenai Penetapan Lokasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Malili
 - e. Melakukan Koordinasi dan konsultasi Dengan Dinas kesehatan mengenai Penetapan Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Malili Kabupaten Luwu Timur
 - f. Melakukan Koordinasi dan konsultasi Dengan Dinas kesehatan mengenai Penetapan Lokasi Unit Pengelola Darah Kecamatan Malili.
2. Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Pertama
 - a. Membuat draf SK Penetapan Penerima dan Besaran Nilai Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Lokasi Bundaran Ruas Tarengge-Batas Kota Malili;

- c. Membuat draf Sk Penetapan Lokasi Sekolah Rakyat
- d. Membuat draf Sk Penetapan Lokasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Malili
- e. Membuat draf Sk Penetapan Lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Malili Kabupaten Luwu Timur
- g. Membuat draf Sk Penetapan Lokasi Unit Pengelola Darah Kecamatan Malili.
- f. Melakukan penginputan SIPD Tahun 2026
- g. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Sekretariat DPKPP.

Malili, 02 Januari 2026

Kepala Bidang Pertanahan,



INDRA WIJAYA, SH.,M.H.

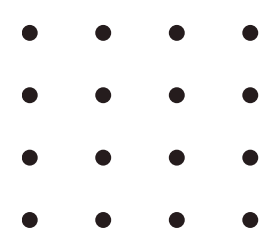
Pangkat : Pembina, VI/a

NIP. 197808022008031001

LAPORAN EVALUASI TRIWULAN IV BIDANG PERUMAHAN TAHUN 2025



DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bidang Perumahan berperan strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak, aman dan terjangkau. Untuk mendukung tujuan tersebut, pemerintah melaksanakan berbagai program di sektor perumahan seperti penyediaan rumah yang layak huni, pembangunan rumah susun dan rumah khusus, penyediaan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) perumahan, serta penataan permukiman. Ketersediaan rumah yang memadai tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas lingkungan permukiman, produktivitas sosial-ekonomi, serta pencapaian target pembangunan nasional dan daerah.

Pelaksanaan Program Perumahan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) memerlukan pemantauan secara berkala agar capaian kinerja dapat terukur serta pelaksanaannya tetap selaras dengan target tahunan. Oleh karena itu, disusunlah Laporan Kinerja Triwulan IV ini untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sekaligus sebagai dasar pengambilan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan di masa mendatang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Bidang Perumahan dimaksudkan untuk mendokumentasikan seluruh capaian pelaksanaan kegiatan selama periode Triwulan tertentu, serta untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur atas hasil kerja yang telah dicapai dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV Bidang Perumahan antara lain:

1. Menyajikan informasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada Bidang Perumahan secara periodik (Triwulanan).
2. Melakukan evaluasi terhadap tingkat capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran pada masing-masing kegiatan.

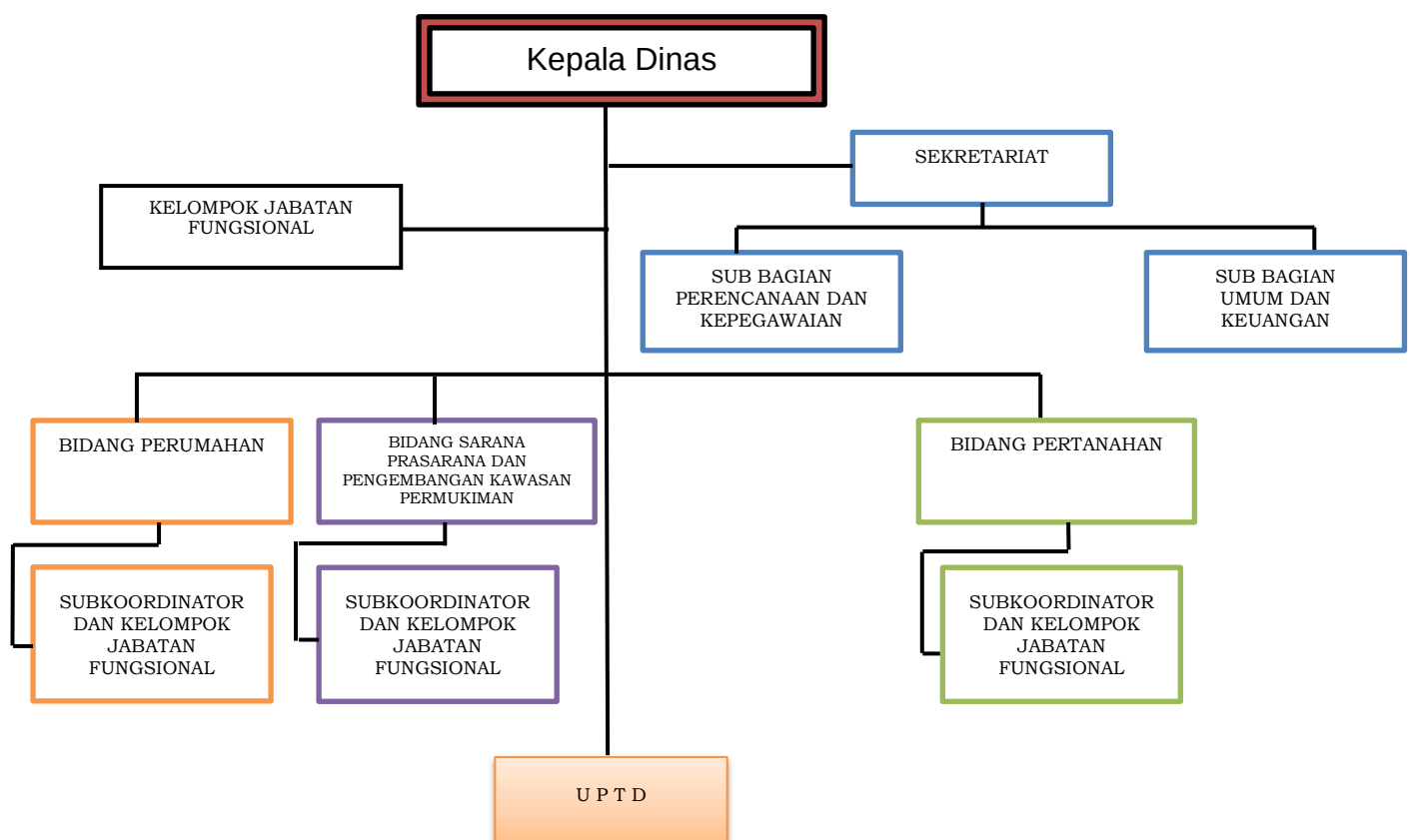
3. Mengidentifikasi kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan di periode berikutnya.
5. Mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaporan yang transparan dan akuntabel.

C. GAMBARAN UMUM BIDANG PERUMAHAN

1. Struktur Organisasi Bidang Perumahan

Dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, seperti termuat pada bagan di bawah ini sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR KABUPATEN LUWU TIMUR



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 57 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perumahan melaksanakan fungsi:

- perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang penyediaan perumahan;
- perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perizinan dan pengawasan tata bangunan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3. Sumber Daya Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang ada di Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur sangat ditentukan oleh sumber daya yang ada. Sumber daya di Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur dapat berupa sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang ada. Sumber daya manusia berupa tenaga teknis yang tetap dilingkup Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada tahun 2025 dapat dilihat distribusinya sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Komposisi SDM Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan
Kawasan Permukiman Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025**

No.	Sub Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	2	3	4	5
1.	Bidang Perumahan	6	6	12

Dari tabel 1.1 diatas digambarkan bahwa komposisi sumber daya manusia pada akhir tahun 2025 sebanyak 12 orang, dengan jumlah pegawai laki-laki sebanyak 6 orang dan jumlah pegawai perempuan sebanyak 6 orang.

Tabel 1.2 Komposisi SDM Bidang Perumahan Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No	Sub Unit Kerja	Jenjang Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	D2	D1	SMA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Bidang Perumahan	-	11	-	-	-	1	12

Dari tabel 1.2 diatas digambarkan bahwa jumlah pegawai pada Bidang Perumahan DPKPP Kab. Luwu Timur pada Triwulan IV tahun 2025, berdasarkan jenjang pendidikan S1 sebanyak 11 orang dan jenjang pendidikan SMA sebanyak 1 orang.

Tabel 1.3 Komposisi SDM Bidang Perumahan Berdasarkan Jenjang Eselon Tahun 2025

No	Jenjang Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	IV/b	1	-	1
2	III/d	-	1	1
3	III/b	1	-	1
4	III/a	3	3	6
5	Staf/Pelaksana	1	2	3
Total		6	6	12

Dari tabel 1.3 diperoleh bahwa Komposisi Sumber Daya Manusia pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Timur pada Triwulan IV tahun 2025 berdasarkan Jenjang Eselon sebanyak 12 orang, terdiri dari: IV/b 1 orang, III/d 1 orang, III/b 1 orang, III/a 6 orang, dan Staf/Pelaksana 3 orang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Visi

Sesuai dengan Visi Luwu Timur yaitu **"LUWU TIMUR Maju dan Sejahtera"**.

2. Misi

Untuk mewujudkan **Visi** yang telah ditetapkan, maka diperlukan **Misi**. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 melaksanakan **Misi** ke-3 (M3) dan **Misi** Ke-4 (M4) yaitu :

1. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3);
2. Menciptakan Kepemerintahan dan Pelayanan Publik yang lebih baik (M4).

3. Tujuan

Tujuan adalah penjabaran dari misi yang merupakan hasil akhir yang harus dicapai dalam kurun waktu perencanaan sampai 5 (lima) tahun. Adapun Tujuan dari DPKPP Kabupaten Luwu Timur adalah :

1. Mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dan Layanan Pertanahan Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Layanan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

4. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, dapat terukur dalam kurun waktu tertentu/ tahunan, lebih pendek dari tujuan, dapat dicapai secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur yang akan dicapai :

1. Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak;
2. Tersedianya Tanah Untuk Kepentingan Umum;
3. Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Tabel 2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur
Bidang Perumahan

TUJUAN & SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
Tujuan : Mewujudkan Perumahan, Kawasan Permukiman yang Layak Huni, Terjangkau dan Layanan Pertanahan Berkelanjutan Sasaran: Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100
	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	19,3

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi, dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang Perumahan telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang Perumahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	(Jumlah warga negara korban bencana yang telah memperoleh rumah layak huni / Total warga negara korban bencana yang membutuhkan rumah layak huni) x 100%	Laporan Bidang Perumahan	Bidang Perumahan
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	(Jumlah perumahan yang telah dilengkapi PSU/ Total perumahan yang menjadi target) x 100%	Laporan Bidang Perumahan dan Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Bidang Perumahan dan Bidang Sarana Prasarana dan Pengembangan Kawasan Permukiman

6. Program

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program. Adapun program-program untuk mendukung masing-masing Sasaran Triwulan IV Tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Program untuk Pencapaian Sasaran DPKPP Kabupaten Luwu Timur
Bidang Perumahan**

SASARAN	PROGRAM PENDUKUNG
SASARAN 1: Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan	1. Pengembangan Perumahan 2. Peningkatan Prasarana dan Utilitas Umum (PSU)

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Bupati, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi. DPKPP Kabupaten Luwu Timur telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2025, berisi penjabaran dari upaya pencapaian tujuan, sasaran dan indikatornya. Pada Triwulan IV Tahun 2025 sasaran, indikator, target kinerja Program disajikan pada Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi (RA) Atas Perjanjian Kinerja (terlampir).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas capaian kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama satu Triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan pada target Triwulan IV. Dalam bab ini juga akan disajikan realisasi keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan IV Tahun 2025.

3.1 Capaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV

a. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Capaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 merupakan pengukuran dan evaluasi terhadap pencapaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur, sesuai dengan Perjanjian Kinerja APBD Tahun 2025 yang telah disepakati bersama, dalam hal ini antara Kepala Dinas dengan Bupati Luwu Timur.

Adapun Capaian Kinerja DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	19,3	19,3	100

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program.

Sasaran Strategis I

Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran I

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Penanganan Perumahan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Serta Tata Kelola Pertanahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	19,3	19,3	100

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Sasaran I memiliki 2 indikator yaitu : Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum).

➤ **Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : "(Jumlah warga negara korban bencana yang telah memperoleh rumah layak huni / Total warga negara korban bencana yang membutuhkan rumah layak huni) x 100%". Indikator sasaran ini, dengan target 100% belum ada realisasi disebabkan tidak ada SK penetapan status bencana.

➤ **Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**

Formulasi indikator yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut : "(Jumlah perumahan yang telah dilengkapi PSU/ Total perumahan yang menjadi target) x 100%".

Rencana aksi untuk mendukung Sasaran I adalah peningkatan kualitas sarana, prasarana dan utilitas perumahan.

❖ Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian Sasaran I yaitu :

✚ Program Pengembangan Perumahan :

1. Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
2. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau

Relokasi Program Kabupaten/Kota

3. Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus

4. Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan

✚ Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU):

1. Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan

❖ Hambatan/Kendala

Dalam pencapaian indikator Sasaran I, terdapat beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi yaitu:

✚ Tidak terlaksana karena tidak ada SK penetapan status bencana;

✚ Terdapat penghuni pada rumah susun dan rumah khusus yang tidak sesuai dengan kriteria penghunian yang telah ditetapkan.

❖ Solusi

Untuk menjawab permasalahan atau kendala yang dihadapi, maka telah dilakukan beberapa solusi yaitu :

✚ Tetap menyiapkan dana untuk Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota;

✚ Melakukan penertiban penghuni yang tidak memenuhi kriteria.

❖ Efisiensi Sumber Daya

✚ Dengan keterbatasan sumber daya sarana, prasarana dan tenaga dalam menyampaikan informasi maupun pengetahuan tentang SPM, maka dapat terfasilitasi dengan adanya website resmi DPKPP Kabupaten Luwu Timur sehingga dengan sendirinya masyarakat dapat langsung melihat informasi terkait kebencanaan dari media. Dan penyebaran informasi kebencanaan juga dilakukan melalui media sosial seperti facebook, instagram, website, serta OPD yang beririsan dengan DPKPP terkait urusan penanganan SPM ini.

2. Perbandingan antara target dan realisasi Triwulan IV Tahun 2025 dengan Triwulan Sebelumnya

Tabel 3.3 Perbandingan Target dan Realisasi Triwulan IV Tahun 2025

dengan Triwulan Sebelumnya

Sasaran I	Meningkatnya Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Layak						Target Tahun 2025 (%)
Indikator Kinerja Sasaran	Triwulan Sebelumnya			Triwulan IV			
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	0	0	0	0	0	100	100
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) (%)	0	0	0	0	0	0	19,3

Berdasarkan tabel di atas maka dapat dijelaskan untuk capaian Triwulan IV belum terealisasi, namun capaian kinerja sasaran telah 100%. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi indikator persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, anggarannya bersifat disediakan namun tidak terealisasi karena tidak ada surat keputusan penetapan tanggap darurat bencana.

3. Perbandingan dengan Target Nasional (Rumah Layak Huni)

Pada Triwulan IV belum ada perbandingan yang dapat dihitung dengan target Nasional. Namun berdasarkan data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Program 3 Juta Rumah s.d. Minggu ke-2 November 2025 (**14 November 2025**) mencapai sebanyak **562.929 unit atau 18,76%**. Capaian Program

3 Juta Rumah sebanyak 562.929 unit ini terdiri atas:

- a. Pembangunan rumah baru (PB) sebanyak 469.563 unit atau 18,98% dari target sebanyak 2.474.471 unit. Capaian terdiri atas Negara (Rumah Susun sebanyak 240 unit, Rumah Khusus sebanyak 416 unit, dan APBD Kabupaten/Kota sebanyak 11.987 unit), Pengembang (FLPP sebanyak 221.395 unit, Rumah Komersial memanfaatkan PPN DTP sebanyak 15.328 unit, Pelonggaran GWM BI sebanyak 60.914 unit), Swadaya sebanyak 158.705 unit dan Gotong Royong (CSR) sebanyak 578 unit.
- b. Peningkatan kualitas (PK) sebanyak 93.366 unit atau 17,77% dari target sebanyak 525.529 unit. Capaian terdiri atas Negara (APBD Kabupaten/Kota sebanyak 49.613 unit), Pengembang (Pembiayaan Mikro PT SMF dan PNM sebanyak 36.451 unit), Swadaya (PBG) sebanyak 786 unit dan Gotong Royong (CSR) sebanyak 6.516 unit.

Program Pengembangan Perumahan

Program pengembangan perumahan merupakan aksi dan inisiatif yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah. Sasaran program ini adalah meningkatnya penanganan perumahan dan pengembangan kawasan permukiman serta tata kelola pertanahan. Indikator program tahun 2025 ada 2 yaitu :

- a. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni. Target Triwulan IV untuk rencana aksi adalah 25%.
- b. Persentase warga Negara yang terkena relokasi akibat program Kabupaten yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni. Target triwulan IV untuk rencana aksi Adalah 25%.

Pada tahun 2025, Program Pengembangan Perumahan didukung oleh 4 kegiatan utama yaitu:

- Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota adalah kegiatan yang menjadi langkah awal yang dilakukan pemerintah untuk memastikan korban bencana atau masyarakat terdampak program relokasi mendapatkan rumah yang layak, aman dan sesuai kebutuhan. Pendataan

menjadi fondasi yang menentukan keberhasilan seluruh proses bantuan perumahan. Indikator kegiatan adalah persentase daerah rawan bencana yang telah dilakukan identifikasi. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi adalah 25%. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Subkegiatan Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah dokumen data rumah sewa milik masyarakat, rumah susun, dan rumah khusus. Target subkegiatan ini adalah 30% dan terealisasi 30% dengan capaian rencana aksi 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa sosialisasi dan penandatanganan perjanjian penghunian rumah khusus nelayan di Desa Mabonta Kec. Burau dan monitoring pemanfaatan rumah deret khusus nelayan di Desa Balo-Balo Kec. Wotu.
- b. Subkegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah dokumen data rumah di lokasi rawan bencana kabupaten/kota. Target subkegiatan ini adalah 50% dan terealisasi 50% sehingga capaian rencana aksi 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa seminar pendahuluan dan seminar akhir dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
- Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan kondisi permukiman, menyediakan hunian yang layak, dan memastikan masyarakat terdampak bencana atau relokasi program dapat tinggal di tempat yang aman, sehat dan berketahanan. Program ini dilakukan setelah proses pendataan, verifikasi dan penerimaan bantuan. Indikator kegiatan ini adalah persentase rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota yang tertangani. Pencapaian rencana kerja belum terealisasi karena tidak adanya SK penetapan status bencana, namun tetap dipersiapkan anggarannya sehingga capaian kinerjanya 100%. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - a. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana. Indikator subkegiatan ini

adalah jumlah rumah korban bencana kabupaten/kota yang ter rehabilitasi. Realisasi dan rencana aksi dari subkegiatan ini adalah 100%.

- b. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terbangun. Realisasi dan rencana aksi dari subkegiatan ini adalah 100%.
- c. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah rumah khusus beserta psu bagi korban bencana kabupaten/kota. Realisasi dan rencana aksi dari subkegiatan ini adalah 100%.
- Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, merupakan upaya untuk memastikan keberlanjutan penghunian, pemeliharaan bangunan, serta pengelolaan lingkungan yang aman, sehat, dan tertib bagi Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau kelompok tertentu yang menempati rumah susun atau rumah khusus. Pembinaan dilaksanakan secara rutin kepada pengelola, penghuni, serta pemangku kepentingan lain agar pengelolaan hunian berjalan sesuai standar teknis dan ketentuan perumahan. Indikator kegiatan ini adalah persentase rumah susun umum dan/atau rumah khusus yang dikelola. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi adalah 25% dengan pencapaian rencana kerja telah terealisasi 100%. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - a. Subkegiatan Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah dokumen pemanfaatan rumah susun umum dan/atau rumah khusus. Target subkegiatan ini adalah 30% dan terealisasi 30% dengan capaian rencana aksi 100%. Adapun kegiatan yang dilakukan berupa penataan penghunian rumah susun sumasang dan pengelolaan rumah susun PNS, pemeliharaan rumah susun PNS dan rumah susun sumasang, serta penyambungan kwh pada rumah susun sumasang.
- Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan,

merupakan proses yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur, menilai, dan menyetujui rencana pembangunan perumahan oleh pengembang, masyarakat, atau badan usaha lainnya. Kegiatan ini penting untuk memastikan bahwa setiap pembangunan perumahan sesuai tata ruang, memenuhi standar teknis, menyediakan PSU yang memadai, serta menjamin keselamatan dan kenyamanan lingkungan. Indikator kegiatan ini adalah persentase pengembang perumahan yang difasilitasi. Untuk indikator ini yang ditargetkan dari rencana aksi adalah 25% dengan realisasi kinerja 100%. Pencapaian target pada kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan. Indikator subkegiatan ini adalah jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan. Target subkegiatan ini adalah 25% dan terealisasi 25% dengan capaian rencana aksi 100%.

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Pengembangan Perumahan

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN	CAPAIAN TRIWULAN IV	KET
					I	II	III	IV	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2,160,931,490	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni (%)	100%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	
			Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni (%)	100%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	282,099,900	Persentase Daerah Rawan bencana yang Telah Dilakukan Identifikasi	100%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	23,199,000	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	4 Dokumen	25%	25%	20%	30%	30%	100%	
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana atau terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	258,900,900	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20%	30%	0%	50%	50%	100%	

			Perumahan								
--	--	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

Program ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perumahan dan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap prasarana, sarana dan utilitas dasar yang memadai. Sasaran program ini adalah terlaksananya peningkatan prasarana sarana dan utilitas umum PSU. Indikator, cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dengan formulasi jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu dikali 100. Target Triwulan IV adalah 25%. Pada tahun 2025, Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum didukung oleh 1 kegiatan yaitu :

- Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan, adalah bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur dasar dan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kehidupan di lingkungan perumahan. Indikator pada kegiatan ini adalah jumlah lingkungan perumahan pada kurun waktu tertentu. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25% dengan realisasi kinerja 100%. Pencapaian target kegiatan ini didukung oleh subkegiatan :
 - a. Subkegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian, aktifitas subkegiatan ini adalah pelaksanaan kegiatan fisik dan pemeliharaan untuk prasarana, sarana dan utilitas yang termasuk dalam kawasan kumuh dan yang merupakan aset DPKPP Kabupaten Luwu Timur, yang dimulai dari penyusunan perencanaan ***Detail Engineering Design***, pembangunan dan pengawasan. Indikator dari subkegiatan ini adalah jumlah lingkungan perumahan yang didukung PSU. Untuk indikator ini yang ditargetkan 25%. Berikut tabel capaian program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Kegiatan dan Subkegiatan Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum

No.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				REALISASI TRIWULAN	CAPAIAN TRIWULAN IV	KET
					I	II	III	IV	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	19,983,745,735	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	19.30%	25%	25%	25%	25%	25%	100%	
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	19,983,745,735	Jumlah Penyediaan Prasarana dan Sarana Pada Perumahan	12 Lingkungan	25%	25%	25%	25%	25%	100%	
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	19,983,745,735	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	11 lokasi	25%	25%	25%	25%	25%	100%	

Sasaran Strategis II

Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Tabel 3.6 Capaian Sasaran II

No	Sasaran Strategis Renstra	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian %
1.	Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Nilai Lakip Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	77,80	0	0

3. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan IV dengan Target Jangka Menengah.

Pada Triwulan IV, yang dapat dibandingkan hanya pencapaian antara kegiatan dan subkegiatan, karena sifatnya dilaksanakan secara rutin.

4. Capaian Program Pendukung Sasaran IV

Tabel 3.7 Capaian Program Pendukung Sasaran IV

No.	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET TAHUNAN	REALISASI TAHUNAN	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	CAPAIAN TRIWULAN
					II	II	II
1	2	3	4	5	6	10	11
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	25%	25%	25%	100%

3.3. Realisasi Anggaran

Anggaran pada APBD-P DPKPP Kabupaten Luwu Timur Bidang Perumahan untuk Program Pengembangan Perumahan dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (Psu) Sebesar Rp. 22,144,677,225 (dua puluh dua miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah). Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran Triwulan IV Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KEUANGAN					
		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN TRIWULAN IV (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
1	2	3	4	5	6('5/4*100)	12('3-4)	13(5/3*100)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	2,160,931,490	2,160,931,490	1,423,100,024	65.86	0	65.86
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi program Kabupaten/Kota	282,099,900	282,099,900	266,879,967	94.60	0	94.60
	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	23,199,000	23,199,000	22,485,233	96.92	0	96.92
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan bencana Kabupaten/Kota	258,900,900	258,900,900	244,394,734	94.40	0	94.40
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	400,000,000	400,000,000	0	0.00	0	100.00
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	200,000,000	200,000,000	0	0.00	0	100.00
	Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana	200,000,000	200,000,000	0	0.00	0	100.00
	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0	0	0	0.00	0	100.00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KEUANGAN					
		JUMLAH ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN TRIWULAN IV (Rp.)	REALISASI ANGGARAN		TOTAL SISA ANGGARAN	
				(Rp.)	(%)	(Rp.)	(%)
	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1,464,593,340	1,464,593,340	1,142,869,551	78.03	0	78.03
	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1,464,593,340	1,464,593,340	1,142,869,551	78.03	0	78.03
	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	14,238,250	14,238,250	13,350,506	93.77	0	93.77
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	14,238,250	14,238,250	13,350,506	93.77	0	93.77
2	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	19,983,745,735	19,983,745,735	19,410,768,546	97.13	0	97.13
	Urusan penyelenggaraan PSU Perumahan	19,983,745,735	19,983,745,735	19,410,768,546	97.13	0	97.13
	Penyediaan prasaran, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	19,983,745,735	19,983,745,735	19,410,768,546	97.13	0	97.13

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Bidang Perumahan DPKPP Kabupaten Luwu Timur pada Triwulan IV Tahun 2025 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja SKPD dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis DPKPP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh DPKPP Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025.

Selanjutnya kami sadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV ini, masih belum pada taraf sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan dalam penyusunan laporan pada Triwulan yang akan datang sangat kami harapkan.

Demikian Laporan Evaluasi Triwulan IV Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 ini sebagai sarana pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja, untuk dapat digunakan sebagai acuan perbaikan pada tiwulan selanjutnya.

Malili, 05 Januari 2026

Kepala Bidang,

Dr. SYAIFULLAH, ST, MT
Pangkat: Pembina
NIP: 197101192001121006

Lampiran
Dokumentasi Pendukung





-2.53262556 121.39671958
Penyampaian Surat
Pengosongan Hunian Rusun Sumasang
Blok C

KAB. LUWU TIMUR								
NO	BIDANG	STATUS 2025 (TW 1)	STATUS 2025 (TW 2)	STATUS 2025 (TW 3)	STATUS 2025 (TW 4)	AKSI 2023 (TW 4)	AKSI 2024 (TW 4)	AKSI 2025 (TW 4)
1	PENDIDIKAN	Sudah Melakukan Input (93.75 %)	Sudah Melakukan Input (93.75 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	📅 2023	📅 2024	📅 2025
2	KESEHATAN	Sudah Melakukan Input (88.40 %)	Sudah Melakukan Input (88.95 %)	Sudah Melakukan Input (95.58 %)	Sudah Melakukan Input (96.69 %)	📅 2023	📅 2024	📅 2025
3	PEKERJAAN UMUM	Sudah Melakukan Input (70.00 %)	Sudah Melakukan Input (70.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	📅 2023	📅 2024	📅 2025
4	PERUMAHAN RAKYAT	Sudah Melakukan Input (85.71 %)	Sudah Melakukan Input (92.31 %)	Sudah Melakukan Input (92.31 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	📅 2023	📅 2024	📅 2025
5	TRANSTIBUMLINMAS	Sudah Melakukan Input (75.00 %)	Sudah Melakukan Input (81.00 %)	Sudah Melakukan Input (84.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	📅 2023	📅 2024	📅 2025
6	SOSIAL	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Belum Melakukan Input (0.00 %)	Sudah Melakukan Input (100.00 %)	Sudah Melakukan Input (96.67 %)	📅 2023	📅 2024	📅 2025





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN IV

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan pada sekretariat Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), maka terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kehadiran ASN dan Upah jasa;
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyusunan laporan keuangan dan Kinerja APBD-P 2025;
2. Kepala Bidang Perumahan
 - a. Percepatan proses penertiba rumah susun Sumasang;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi subkegiatan sesuai dengan target perencanaan PSU Perumahan.
3. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman
 - a. Monitoring dan evaluasi pekerjaan fisik APBD-P 2025;
 - b. Percepatan penyusunan kebijakan untuk Perda RP3KP;
4. Kepala Bidang Pertanahan
 - a. Melakukan koordinasi dengan bidang aset pada BKAD dan BPN terkait pengusulan persertifikatan aset Pemda, penetapan lokasi dan pengadaan tanah terkait dengan program prioritas Bupati terpilih.

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Sekretariat dan Bidang-bidang pada DPKPP.

Malili, 31 Desember 2025
Kepala DPKPP

Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 197403232003121004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN IV

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), maka terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kasubag Umum dan Keuangan
 - a. Melakukan percepatan penyusunan neraca dan LRA Tahun 2025.
 - b. Percepatan dalam proses kelengkapan administrasi bahan evaluasi oleh Inspektorat dan BPK.
 - c. Melakukan monitoring realisasi keuangan setiap kegiatan.
2. Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian
 - a. Melakukan percepatan penyelesaian dokumen terkait sub bagian perencanaan Tahun 2025.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai.

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Sekretariat DPKPP.

Malili, 31 Desember 2025

SEKRETARIS,

IWAN SETIAWAN, ST

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 1977100220050210



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili, Kodepos 92981
Telepon : (0474) 321-634, Fax. : (0474) 321-634



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN IV

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan pada sekretariat Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), maka terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris
 - a. Melakukan evaluasi terhadap kehadiran ASN dan Upah jasa;
 - b. Melakukan monitoring terhadap penyusunan laporan keuangan dan Kinerja APBD-P 2025;
2. Kepala Bidang Perumahan
 - a. Percepatan proses penertiba rumah susun Sumasang;
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi subkegiatan sesuai dengan target perencanaan PSU Perumahan.
3. Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Kawasan Permukiman
 - a. Monitoring dan evaluasi pekerjaan fisik APBD-P 2025;
 - b. Percepatan penyusunan kebijakan untuk Perda RP3KP;
4. Kepala Bidang Pertanahan
 - a. Melakukan koordinasi dengan bidang aset pada BKAD dan BPN terkait pengusulan persertifikatan aset Pemda, penetapan lokasi dan pengadaan tanah terkait dengan program prioritas Bupati terpilih.

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Sekretariat dan Bidang-bidang pada DPKPP.

Malili, 31 Desember 2025
Kepala DPKPP

Drs. H. BAHRI SULI, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 197403232003121004



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN IV

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), maka terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan selanjutnya, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kasubag Umum dan Keuangan
 - a. Melakukan percepatan penyusunan neraca dan LRA Tahun 2025.
 - b. Percepatan dalam proses kelengkapan administrasi bahan evaluasi oleh Inspektorat dan BPK.
 - c. Melakukan monitoring realisasi keuangan setiap kegiatan.
2. Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian
 - a. Melakukan percepatan penyelesaian dokumen terkait sub bagian perencanaan Tahun 2025.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap kedisiplinan pegawai.

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Sekretariat DPKPP.

Malili, 31 Desember 2025

SEKRETARIS,

IWAN SETIAWAN, ST

Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 1977100220050210



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili, Kodepos 92981
Telepon : (0474) 321-634, Fax. : (0474) 321-634



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
KEPALA BIDANG PERUMAHAN PADA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 02 Januari 2026
Yang Melakukan Evaluasi
Kepala Dinas

Drs. H. BAHRI SULI., MM
Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP: 196606201986031007



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN**

Jl. Soekarno Hatta Malili 92981
Telepon : Email : (0474) 321-634, Fax. (0474) 321-634
email: tarkim@luwutimurkab.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIEVALUASI ATAS KINERJA
FUNGSIONAL ANALIS KEBIJAKAN PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KAB. LUWU TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

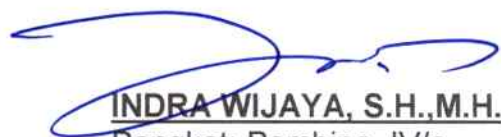
Kami telah melakukan Evaluasi Kinerja yang dilaporkan oleh Fungsional Analis Kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan atas pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan berdasarkan Rencana Aksi yang disusun sebelumnya.

Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab atas yang bersangkutan, tanggung jawab kami sebatas pada saran perbaikan yang diberikan.

Evaluasi ini bertujuan untuk memberikan keyakinan atas capaian kinerja yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil Evaluasi kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam penyajian informasi yang dilaporkan.

Malili, 02 Januari 2026
Yang Melakukan Evaluasi
Kepala Dinas



INDRA WIJAYA, S.H.,M.H.

Pangkat: Pembina, IV/a
NIP: 19780802 200803 1 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN**

Jl. Soekarno – Hatta, Malili, Kodepos 92981
Telepon : (0474) 321-634, Fax. : (0474) 321-634

REKOMENDASI HASIL EVALUASI TRIWULAN IV

Berdasarkan hasil evaluasi Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, dengan melihat realisasi keuangan dan kinerja pada program/kegiatan/subkegiatan pada bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), terdapat beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan kegiatan Triwulan IV, adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Fungsional

- a. Melakukan sosialisasi dan penandatanganan perjanjian penghunian rumah khusus nelayan di Desa Mabonta Kec. Burau dan monitoring pemanfaatan rumah deret khusus nelayan di Desa Balo-Balo Kec. Wotu.
- b. Melakukan seminar pendahuluan dan seminar akhir dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana bersama PT. Arina Konsultan.
- c. Melakukan penyambungan kwh pada Rusun Sumasang
- d. Melakukan pemeliharaan pada Rusun PNS dan Rusun Sumasang.
- e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi mengenai pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan.

2. Pelaksana

- a. Melakukan pembenahan administrasi hasil penataan dan pemeliharaan rusunawa PNS dan rusun Sumasang.

Demikian rekomendasi ini dibuat sebagai bahan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan evaluasi berjenjang di lingkup Bidang-bidang pada DPKPP.

Malili, 05 Januari 2026
Kepala Bidang Perumahan,

Dr. SYAIFULLAH, ST, MT

Pangkat: Pembina

NIP: 197101192001121006